

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Membina Kelompok  
Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin  
(Studi di Kecamatan Kuantan Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Bidang Ilmu Sosial  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Oleh:**

**Diki Dwi Nata  
NPM : 147310565**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Membina Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Kecamatan Kuantan Tengah” Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta jajaran dosen ilmu pemerintahan dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan tunjuk ajarnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

4. Bapak Data Wardana, S.Sos., M.IP selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam skripsi ini.
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi yang telah bersedia memberikan data awal yang dibutuhkan dalam skripsi ini dan telah meluangkan waktu pengumpulan data penelitian.
6. Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin di Kecamatan Kuantan Tengah yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam pengumpulan data penelitian ini.
7. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, Maret 2021

Penulis,

**Diki Dwi Nata**  
**NPM: 147310565**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	vii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	x
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	xi
<b>ABSTRAK .....</b>	xii
<b>ABSTRACT .....</b>	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
1. Tujuan Penelitian .....	15
2. Kegunaan Penelitian.....	15
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN. ....</b>	16
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Ilmu Pemerintahan .....	16
2. Konsep Pemerintahan.....	17
3. Konsep Pemerintah Daerah.....	20
a. Pengertian Pemerintah Daerah.....	20
b. Prinsip Pemerintah Daerah .....	22
4. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah.....	23
a. Pengertian Otonomi Daerah.....	23
b. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah.....	25
5. Kewenangan Daerah .....	26
a. Pengertian Kewenangan Daerah .....	26
b. Sifat Kewenangan Daerah .....	28
6. Teori Peranan .....	29
7. Pembinaan .....	31
B. Penelitian Terdahulu .....	35
C. Kerangka Pikiran.....	39
D. Konsep Operasional Variabel .....	41
E. Operasionalisasi Variabel.....	42
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	44
A. Tipe Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan Penelitian.....	45



D. Teknik Penetapan Informan .....	45
E. Jenis dan Sumber Data .....	45
F. Teknik Pengumpulan Data .....	46
G. Teknik Analisis Data .....	47
H. Jadwal Penelitian .....	49
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi .....	51
B. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi .....	55
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Membina Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Kecamatan Kuantan Tengah .....	63
1. Penyuluhan .....	69
2. Pengarahan .....	75
3. Bimbingan .....	82
B. Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Membina Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Kecamatan Kuantan Tengah .....	88
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN :</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Perbandingan Jumlah Penduduk dan Masyarakat Miskin Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014-2016 .....	7
I.2 Persentase Masyarakat Miskin Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014-2016.....	8
I.3 Jumlah dan Jenis Kube di Kabupaten Kuantan Singingi .....	10
I.4 Jumlah KUBE di Kabupaten Kuantan Singingi.....	10
1.5 Target Realisasi Kegiatan Pembinaan Masyarakat Miskin Melalui Program KUBE tahun 2016-2019 Kabupaten Kuantan Singingi .....	11
I.6 Kegiatan Pembinaan masyarakat miskin melalui program KUBE tahun 2016-2019 Kabupaten Kuantan Singingi .....	12
1.7 Kelompok Kube di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi .....	14
II.1 Penelitian Terdahulu .....	35
II.2 Operasional Variabel Tentang Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Membina Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Kecamatan Kuantan Tengah .....	42
III.1 Informan Penelitian.....	45
III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Membina Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Kecamatan Kuantan Tengah .....	50
IV.1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi .....	52
IV.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi .....	53
IV.3 Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi.....	54
V.1 Jumlah KUBE di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2017-2019 .....	72
V.2 Jumlah KUBE di Kecamatan Kuantan Tengah Memperoleh Diklat Tahun 2017-2019 .....	80
V.3 Jumlah Dana Bantuan KUBE di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2017-2019 .....	81
V.4 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan KUBE.....	86

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pikir Tentang Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Membina Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Kecamatan Kuantan Tengah .....	40
IV.1	Peta Kabupaten Kuantan Singingi .....	52



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Halaman
1. Lembar Pertanyaan Wawancara .....	97
2. Dokumentasi Penelitian .....	101
3. Surat Keterangan dan Rekomendasi Penelitian .....	104



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diki Dwi Nata  
NPM : 147310565  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Membina Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Kecamatan Kuantan Tengah

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2021  
Pelaku Pernyataan,

**Diki Dwi Nata**  
**NPM: 147310565**

**ABSTRAK****PERANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM MEMBINA  
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) FAKIR MISKIN DI  
KECAMATAN KUANTAN TENGAH**

Oleh:

**Diki Dwi Nata**  
NPM : 147310565**Kata Kunci:** Peranan, Membina, KUBE

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peranan dan hambatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Membina Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Kecamatan Kuantan Tengah. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui sumber data dari informan, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bawa pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dari program kerja yang telah dilaksanakan pada pembentukan KUBE dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dinas Sosial yang merupakan instansi yang paling dekat dengan masalah kemiskinan sangat berperan pengentasan kemiskinan masyarakat. Program KUBE merupakan program yang sarannya adalah keluarga fakir miskin atau kurang mampu. Tujuan program tersebut adalah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial keluarga miskin dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi.

## ABSTRACT

*THE ROLE OF SOCIAL, COMMUNITY EMPOWERMENT AND VILLAGE OF  
KUANTAN SINGII DISTRICT IN FOSTERING A JOINT BUSINESS GROUP  
(KUBE) OF THE POOR IN CENTRAL KUANTAN DISTRICT*

By:

Diki Dwi Nata  
NPM: 147310565

*Keywords: Role, Fostering, KUBE*

*The purpose of this study was to determine the roles and obstacles of the Social Service, Community Empowerment and Village of Kuantan Singingi Regency in Fostering the Poor Collective Business Group (KUBE) in Central Kuantan District. This research uses descriptive type with a qualitative approach through data sources from informants, observation, and documentation. The collected data were classified according to the type and form and then presented descriptively. Based on the results of the analysis in the research discussion, it is concluded that the government of Kuantan Singingi Regency in alleviating poverty can be seen from the work program that has been implemented in the formation of KUBE in an effort to alleviate poverty. The Social Service, which is the agency closest to the problem of poverty, has a very important role in alleviating community poverty. The KUBE program is a program aimed at poor or underprivileged families. The aim of the program is to try to improve the quality of life and social welfare of poor families in the context of accelerating poverty alleviation in Kuantan Singingi Regency.*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan telah menjadi permasalahan diberbagai negara berkembang dan sedang berkembang. Sebagian besar negara berkembang dan sedang berkembang merancang berbagai program untuk menurunkan atau menuntaskan masalah kemiskinan yang ada. Di mana saat ini negara berkembang dan sedang berkembang paling banyak terdapat dibelahan benua Asia dan Afrika. Sementara bagi negara maju, sangat tertarik membahas kemiskinan, karena kondisi di negara berkembang berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik mereka. Dengan demikian masalah kemiskinan telah menjadi urusan semua bangsa untuk dituntaskan agar tidak ada lagi kesenjangan antar umat manusia.

PBB pada milenium kedua ini telah memelopori pertemuan tingkat tinggi yang menghasilkan “*Tujuan Pembangunan Milenium (TPM)*” atau dikenal dengan “*Millenium Development Goals (MDGs)*”. Kedelapan komponen MDGs meliputi: menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; mencapai pendidikan untuk semua kalangan; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian ibu; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS; Malaria dan penyakit menular lainnya; memastikan keberlanjutan lingkungan hidup; membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Implementasi *Millenium Development Goals (MDGs)* di Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi negara, pembukaan UUD 45 dan Pancasila. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34. Realisasinya diuraikan dalam Peraturan Pemerintah



Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1981. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam Bab II Pasal 3 ayat 1 dan 3 dan Pasal 4, mengandung makna bahwa Pelayanan kesejahteraan sosial...dst bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi masalah kemiskinan, masalah sosial dan kerawanan sosial ekonomi (UN, 2007).

Beberapa ayat menyebutkan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial berasaskan: *hak asasi manusia, kebersamaan, menjunjung tinggi kearifan local, dan berkelanjutan*. Adapun prinsip dalam pelayanan kesejahteraan sosial antara lain adalah kepentingan terbaik bagi *penerima manfaat, partisipasi, kesetiakawanan, dan profesionalisme*.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Klasifikasi Urusan Pemerintahan terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
- 2) Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah pusat;
- 3) Urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 4) Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah;
- 5) Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal yang dipaparkan di atas memberikan penjelasan bahwa urusan pemerintah setidaknya terbagi menjadi 3 yakni urusan pemerintahan absolut, pemerintah konkuren, dan pemerintah umum. Dari 3 urusan tersebut penanganan kemiskinan masyarakat merupakan urusan pemerintah konkuren yang ditangani

oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di mana salah satu bentuk penanganan masalah kemiskinan adalah dengan menetapkan berbagai program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat salah satunya adalah dengan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Hasil penelitian Hikmah Wati (2016) menyimpulkan bahwa terdapat beberapa aktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan penyaluran bantuan terhadap fakir miskin perkotaan di Provinsi Lampung yakni: minimnya pengetahuan kelompok KUBE dalam pembuat rekening untuk kepentingan bersama yang menghabiskan waktu cukup lama, bahasa, terkadang saat sosialisasi dan evaluasi seksi pemberdayaan fakir miskin mengalami kesulitan interaksi dengan anggota KUBE karena mereka terkadang masih sering menggunakan bahasa suku atau bahasa daerah masing, dana yang dialokasikan kepada KUBE untuk tujuan kesejahteraan hidup mereka sering di salah gunakan.

Purnama Sari (2016) Hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: (1) Terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang beranggotakan ibu-ibu rumah tangga yang termasuk ke dalam masyarakat prasejahtera; (2) Produk makanan kue kering, keripik pisang dan keripik singkong merupakan produk yang dijadikan media usaha bagi para peserta; (3) Pendampingan usaha dengan memberikan pemahaman mengenai bagaimana mengelola dan mengembangkan usaha kecil.

Penelitian Evi Fitriani (2015) menyimpulkan bahwa bantuan dana modal untuk KUBE sudah berjalan dengan baik, jumlah anggaran dana yang mereka terima juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tepat sasaran untuk masyarakat

kurang mampu dalam membantu perekonomian, waktu penerimaan dana yang akan dicairkan juga tepat waktu, akan tetapi ketika KUBE baru berdiri pemerintah tepat waktu dalam mencairkan dana tersebut.

Sementara hasil penelitian Andi Fitrah P. Putra (2014) menyimpulkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dimaksud adalah program pemberdayaan fakir miskin yakni program bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) dan program bantuan kelompok usaha bersama (KUBE). Kemudian yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut yaitu adanya beberapa target pada indikator sasaran yang tidak dicapai sepenuhnya. Namun secara keseluruhan kedua program ini telah terlaksana dengan cukup baik.

Begitu juga dengan penelitian Ace Lingga Jati (2013) menyimpulkan bahwa Fungsi Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat belum berhasil dikarenakan minimnya SDM yang ada dalam masyarakat dan kurangnya perhatian pemerintah dalam mengontrol perkembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Berdasarkan hasil pemaparan sebelumnya dan penelitian terdahulu di atas mengindikasikan bahwa program KUBE yang dibentuk merupakan usaha untuk mempercepat tumbuhnya perekonomian masyarakat miskin, sehingga pengetasan kemiskinan dapat dengan segera ditangani. Program KUBE diperuntukkan bagi masyarakat miskin, sehingga dengan adanya program ini masyarakat miskin bisa mendapat berbagai bantuan keahlian, pengetahuan, dan modal dalam upaya meningkatkan perekonomian dan juga mengetaskan kemiskinan yang ada.

Pendekatan pelaksanaan program KUBE mengarah pada pendekatan pemberdayaan masyarakat diantaranya :

- a. Program pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada “Pembangunan Bertumpu pada Kelompok” (*community based development approach*).
- b. Pendekatan pada kelompok ini didasarkan atas kesamaan tujuan, kesamaan kegiatan, kesamaan domisili, yang mengarah pada efisiensi, efektifitas, serta mendorong tumbuh dan berkembangnya social capital (modal usaha)
- c. KUBE bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai wadah/organisasi dalam mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Program KUBE telah dimulai sejak tahun 1982, namun sejak tahun 2006 pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mencoba menyempurnakan pendekatan dan penyelenggaraan program KUBE. Jika pada tahun sebelumnya penyaluran bantuan kepada KUBE melalui perantara terpusat, tanpa pendampingan, maka mulai tahun 2006 sudah dilakukan perubahan dan penyempurnaan. Penyempurnaan program terus terus dilakukan melalui kerja sama dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Bantuan tidak lagi melalui pihak ketiga, namun disediakan sendiri oleh anggota KUBE.

Pembentukan KUBE dilandasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kemudian dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan diperjelas melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan



berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pasal 2 disebutkan KUBE bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin, mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, kapasitas individu, dan kemampuan berusaha anggota kelompoknya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Pelaksanaan program KUBE merupakan salah program yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat miskin dan mengurangi angka kemiskinan. Program KUBE ini bersentuhan langsung kepada masyarakat miskin dengan melaksanakan beragam kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan masyarakat yang terorganisir secara berkelompok.

Berdasarkan data statistik angka kemiskinan di Provinsi Riau masih tinggi, sehingga dibutuhkan program-program yang mampu memperbaiki perekonomian dan meningkatkan tarah hidup masyarakat. Adapun jumlah masyarakat miskin di Provinsi Riau dikelompokkan berdasarkan kabupaten/kota yang dapat dilihat pada distribusi tabel di bawah ini:

Tabel I.1 Perbandingan Jumlah Penduduk dan Masyarakat Miskin Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014-2016

No	Kabupaten/ Kota	2014		2015		2016	
		Jumlah Penduduk	Miskin	Jumlah Penduduk	Miskin	Jumlah Penduduk	Miskin
1	Kuantan Singingi	310.619	33.391	314.276	33.941	317.935	31.316
2	Indragiri Hulu	400.901	29.185	409.431	31.772	417.733	29.868
3	Indragiri Hilir	694.614	52.165	703.734	57.073	713.034	56.971
4	Pelalawan	377.221	42.060	396.990	47.996	417.498	45.925
5	Siak	428.499	22.368	440.841	24.996	453.052	25.008
6	Kampar	773.171	67.111	793.005	72.718	812.702	68.104
7	Rokan Hulu	568.576	57.597	592.278	65.447	616.466	68.119
8	Bengkalis	536.138	38.602	543.987	40.146	551.683	37.625
9	Rokan Hilir	627.233	45.662	644.680	49.447	662.242	52.781
10	Kepulauan Meranti	179.894	60.894	181.095	61.717	182.152	56.267
11	Pekanbaru	1.011.467	32.063	1.038.118	33.946	1.064.566	32.682
12	Dumai	280.109	13.529	285.967	15.042	291.908	13.836
Jumlah		6.188.442	494.627	6.344.402	534.241	6.500.971	518.502

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2017

Berdasarkan data di atas tergambar dengan jelas angka kemiskinan dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan total pada tahun 2017 sebanyak 518.502 masyarakat miskin dari total penduduk sebanyak 6.500.971 jiwa. Dengan tingginya angka kemiskinan tersebut tentunya berbagai upaya harus ditempuh untuk mengurangi angka kemiskinan sebagaimana yang diteliti saat ini yakni pelaksanaan program KUBE bagi masyarakat miskin.

Data yang dipaparkan tersebut salah satu Kabupaten yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi adalah Kabupaten Kuantan Singingi yang rata-rata angka kemiskinan 10% dari total jumlah penduduk 317.935 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat persentase masyarakat miskin di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2014-2016.

Tabel I.2 Persentase Masyarakat Miskin Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014-2016

No.	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016
1	Kuantan Singingi	10,75	10,80	9,85
2	Indragiri Hulu	7,28	7,76	7,15
3	Indragiri Hilir	7,51	8,11	7,99
4	Pelalawan	11,15	12,09	11,00
5	Siak	5,22	5,67	5,52
6	Kampar	8,68	9,17	8,38
7	Rokan Hulu	10,13	11,05	11,05
8	Bengkalis	7,20	7,38	6,82
9	Rokan Hilir	7,28	7,67	7,97
10	Kepulauan Meranti	33,85	34,08	30,89
11	Pekanbaru	3,17	3,27	3,07
12	Dumai	4,83	5,26	4,74
	Rata-rata	9,75	10,19	9,53

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2017

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya mengadakan pembinaan terhadap masyarakat miskin yang tergabung dalam KUBE. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017 jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pembinaan dari pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sangat sedikit tidak sebanding dengan jumlah kemiskinan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun jumlah fakir miskin tahun 2017 adalah jumlah penerima Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dari Kementerian Sosial RI untuk wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebanyak 10.973 KK.

Dengan demikian salah satu daerah di Provinsi Riau yang melaksanakan pembinaan terhadap KUBE adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Masyarakat yang membentuk KUBE pada umumnya masih memiliki pendapatan ekonomi yang minim. Hal tersebut dilatar belakangi oleh rendahnya pendidikan, kurangnya ketrampilan, dan kurangnya lapangan pekerjaan.

Untuk melaksanakan kewenangan mengenai masalah penanganan sosial masyarakat, maka disusunlah struktur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Di mana dalam salah satu bidang yang terdapat pada dinas ini adalah bidang Pemberdayaan Sosial yang menyelenggarakan urusan penanggulangan masyarakat miskin dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian jelaslah bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan sosial masyarakat. Dengan salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetas kemiskinan berupa pemberdayaan masyarakat miskin melalui program KUBE.

Kebijakan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program KUBE terdapat berbagai dimensi persoalan yang ditemui yakni:

1. Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui program KUBE belum mampu mengakomodir kelompok masyarakat dalam jumlah yang besar, sehingga setiap tahunnya hanya bisa dilakukan pembinaan berupa pemberian pelatihan terhadap 10-40 kelompok, padahal sangat banyak kelompok masyarakat yang membutuhkan pembinaan dari pemerintah daerah. Dimana jumlah KUBE yang terdata oleh Dinas Sosial dari tahun 2014-2019 sejumlah 164 kelompok. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber dana berupa anggaran yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi menjadi kendala dalam mengembangkan program KUBE dimasyarakat dengan maksimal.



Tabel 1.3 Jumlah dan Jenis Kube di Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Jenis Kube	Jumlah
1	Ternak (Sapi/Kerbau, Kambing, Puyuh, dll)	23
2	Budidaya (perikanan, dll)	38
3	Tanaman Holtikultura	41
4	Usaha perdagangan (kecil)	15
5	Industri rumah tangga (kecil)	26
6	Kerajinan tangan	11
7	Lain-lain	10
Jumlah		164

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi, 2020

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa jumlah KUBE yang ada dan masih aktif di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 164 Kelompok. Dari jumlah kelompok tersebut sebanyak 18 kelompok berada di Kecamatan Kuantan Tengah.

Tabel I.4 Jumlah KUBE di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	KUBE		Keterangan
		Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota	
1	Kuantan Mudik	13	130	Setiap kelompok beranggotakan 5 – 15 orang (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tertuang dalam Pasal 3 angka (2))
2	Hulu Kuantan	7	70	
3	Gunung Toar	8	80	
4	Pucuk Rantau	6	60	
5	Singingi	14	140	
6	Singingi Hilir	12	120	
7	Kuantan Tengah	18	180	
8	Sentajo Raya	14	140	
9	Benai	9	90	
10	Kuantan Hilir	8	80	
11	Pangean	11	110	
12	Logas Tanah Darat	12	120	
13	Kuantan Hilir Seberang	13	130	
14	Cerenti	10	100	
15	Inuman	9	90	
Total		164	1.600	

Sumber: Dinas Sosial Kab. Kuantan Singingi, 2020

Untuk melakukan pembinaan terhadap KUBE yang ada pemerintah daerah melalui Dinas Sosial melakukan berbagai langkah pemberdayaan

masyarakat, salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan terhadap KUBE. Di mana pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan anggota KUBE dan memberikan bantuan dana atau modal kerja bagi KUBE untuk menjalankan usahanya.

Tabel 1.5 Target Realisasi Kegiatan Pembinaan Masyarakat Miskin Melalui Program KUBE tahun 2016-2019 Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tahun	Target		Realisasi (Rp)	Kegiatan	Jumlah Peserta
		APBD (Rp)	APBD-P (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
1	2016	270.320.000,-	-	148.245.600,-	Pelatihan berusaha KUBE fakir miskin	100 KK atau 10 kelompok
2	2017	295.470.000,-	189.050.000,-	187.157.200,-	Pelatihan berusaha KUBE fakir miskin	100 KK atau 10 kelompok
3	2018	-	-	-	-	-
4	2019	672.421.000,-	-	672.421.000,-	Pelatihan KUBE	400 KK atau 40 kelompok

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi, 2020

Dengan demikian jelaslah bahwa program pembinaan masyarakat miskin yang tergabung dalam KUBE dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi berupa pemberian pendidikan dan pelatihan bagi setiap anggota KUBE pada setiap kegiatan dengan kelompok KUBE yang berbeda. Sedikit jumlah kelompok KUBE yang diberikan pendidikan dan pelatihan setiap tahunnya, padahal KUBE yang ada berjumlah 164 kelompok. Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi telah merencanakan memberikan pendidikan dan

pelatihan setiap tahunnya dalam rentang 20 – 40 kelompok, sehingga tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai dan angka kemiskinan bisa menurun. Namun dikarenakan terbatasnya dana APBD yang dialokasikan untuk kegiatan Dinas Sosial, maka realisasi rencana pemberdayaan masyarakat miskin melalui program KUBE jauh dari target ideal yang ditetapkan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin yang tergabung dalam KUBE dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang keahlian dari kelompok KUBE yang dibentuk, serta setelah selesai pendidikan dan pelatihan setiap kelompok diberikan modal sebesar Rp. 800.000,-/perorang untuk mengaplikasikan pendidikan dan pelatihan yang telah diterima.

2. Program KUBE yang telah dibentuk hanya berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melakukan pembinaan berupa pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan masyarakat dan selanjutnya diserahkan kepada masyarakat untuk mengimplementasikan pendidikan dan pelatihan yang diberikan tanpa ada evaluasi dampak dari diklat yang telah diberikan kepada masyarakat.

Tabel I.6: Kegiatan Pembinaan masyarakat miskin melalui program KUBE tahun 2016-2019 Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tahun	Kegiatan	Jumlah KUBE
1	2016	Pelatihan berusaha kelompok usaha bersama (KUBE) fakir miskin dalam bentuk pelatihan kerajinan tangan atau olahan dari berbagai bahan yang ada dilingkungan	20 Kube
2	2017	Pelatihan berusaha kelompok usaha bersama (KUBE) fakir miskin peningkatan mutu atau kualitas produk yang dihasilkan	20 Kube
3	2018	Tidak dianggarkan	-
4	2019	Pelatihan dan pembinaan KUBE	40 Kube

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi, 2020

3. Banyak kelompok KUBE beranggotakan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik, padahal program ini ditujukan kepada masyarakat miskin.

Mengindikasikan bahwa banyak kelompok masyarakat yang memiliki perekonomian cukup baik tergabung di dalam program KUBE. Indikasi ini terlihat dari jenis usaha yang dikelola masing-masing kelompok ada kelompok yang bermodalkan cukup besar seperti ternak sapi. Dimana untuk ternak sapi dibutuhkan modal untuk bibit sapi jantan dan betina Rp. 16.000.000 – 20.000.000, sementara modal yang diberikan pemerintah daerah paling besar Rp. 8.000.000,-. Perbedaan ini sangat jelas, bahwa terdapat 4 kelompok KUBE diikutsertakan sebagai penerima pemberdayaan pada kenyataannya memiliki tingkat ekonomi yang sudah baik.

- a. Terbatasnya jumlah masyarakat yang diberikan pendidikan dan pelatihan setiap tahun anggaran.
- b. Program KUBE yang telah dibentuk hanya berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melakukan pembinaan berupa pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan masyarakat dan selanjutnya diserahkan kepada masyarakat untuk mengimplementasikan pendidikan dan pelatihan yang diberikan tanpa ada evaluasi dampak dari diklat yang telah diberikan kepada masyarakat.
- c. Banyak kelompok KUBE beranggotakan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik, padahal program ini ditujukan kepada masyarakat miskin. Dari 18 KUBE yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah



terdapat 3 Kelompok yang beranggotakan masyarakat yang mampu secara ekonomi yang tergabung dalam jenis KUBE ternak dan usaha perdagangan.

Tabel 1.7 Kelompok Kube di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Jenis Kube	Jumlah
1	Ternak (Sapi/Kerbau, Kambing, Puyuh, dll)	7
2	Budidaya (perikanan, dll)	1
3	Tanaman Holtikultura	1
4	Usaha perdagangan (kecil)	1
5	Industri rumah tangga (kecil)	3
6	Kerajinan tangan	1
7	Lain-lain	4
Jumlah		18

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi, 2020

Dengan demikian, jelaslah bahwa peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pembinaan KUBE di Kabupaten Kuantan Singingi, dikarenakan KUBE diperuntukkan bagi masyarakat miskin untuk ditingkatkan kesejahteraannya dan mengurangi angka kemiskinan masih 9,85% dari jumlah penduduk. Penetapan lokasi penelitian dikarenakan banyaknya jumlah KUBE yang terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah bila dibandingkan dengan kecamatan lain, sehingga memungkinkan peneliti untuk menjawab bentuk pembinaan yang telah dilakukan dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat yang tergabung dalam KUBE. Selain itu jumlah, jenis KUBE di Kuantan Tengah juga sangat beragam.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas maka penulis merumuskan masalahnya yaitu: Bagaimana Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Membina Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Kecamatan Kuantan Tengah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Membina Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Kecamatan Kuantan Tengah.
- b. Untuk mengetahui hambatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Membina Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Kecamatan Kuantan Tengah.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis.

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan terutama pelaksanaan manajemen pemerintahan.
- b. Dapat dijadikan bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti serta mempelajari masalah peranan dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- c. Secara praktis dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pembinaan masyarakat terutama pada KUBE.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Ilmu Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011:7) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pemerintah, atau satuan kerja publik itu bekerja untuk bekerja dan melindungi tuntutan, yang berupa harapan dan kebutuhan, dari yang diperintahkan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan: tampak pola pemikiran yang memfokuskan kepada yang diperintahkan, warga masyarakat atau rakyat.

Ilmu pemerintahan salah satu sumber ilmu yang mempelajari tentang pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dengan satuan-satuan publik yang bekerja memberikan pelayanan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Ilmu pengetahuan menurut Ndraha (2011:18) pada umumnya mempunyai dua fungsi; keluar dan kedalam. Keluar, sesuatu ilmu yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi suatu objek, merekam dan menggambarkan suatu keadaan, menerangkan hubungan antara gejala, menguji pengetahuan lain, dan meramalkan apa yang akan dan dapat terjadi.

Pengertian ilmu pemerintah diatas merupakan suatu kesatuan ilmu yang mempunyai landasan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dengan memperhatikan proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang

dilaksanakan satuan kerja, sehingga didapati berbagai gejala dan fenomena perkembangan atau kemunduran yang dapat ditelaah secara empirik.

Ilmu pemerintah suatu ilmu yang bisa diimplementasikan untuk mengetahui hubungan antara penyelenggara pemerintah suatu negara dengan penduduknya, sehingga didapati perkembangan dari penyelenggaraan pemerintahan dan hubungannya dengan masyarakat.

Menurut Syafiie (2010: 20) ilmu pemerintahan merupakan suatu ilmu serta seni. Seni yang dimaksud merupakan sebuah perumpamaan karena banyak pemimpin pemerintahan tanpa melalui pendidikan pemerintahan mampu berkiat dengan kharismatik untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan ilmu adalah syarat-syarat yang dapat di pelajari dan di ajarkan, ada objek, bersifat universal, sistematis dan spesefik. Sehingga ilmu pemerintahan memiliki arti ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan yang baik dan benar.

Pengertian di atas memberikan penjelasan bahwa ilmu pemerintahan merupakan seni dalam mengelola tatanan pemerintahan, sehingga pemerintahan yang dijalani bergerak dengan dinamis. Kemudian dikatakan sebagai ilmu dikarenakan pemerintah bisa dipelajari dan diajari dengan secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan.

## **2. Konsep Pemerintahan**

Pemerintahan merupakan tatanan organisasi yang besar dan terstruktur yang berjalan secara dinamis untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara. Suryaningrat (2002:2) mengatakan: “Pemerintahan adalah perbuatan atau cara



urusan pemerintah, pemerintahan yang adil dan pemerintahan yang demokrasi. Sedangkan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lain, pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan”. Rasyid (1997: 73) mengatakan Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan pada masyarakat, bukan melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama, karena birokrasi publik berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan layanan baik dan profesional.

Sarundajang (2002: 25) mengemukakan bahwa: “Pemerintah sebagai suatu sub komponen geografis suatu negara yang berdaulat, pemerintah berfungsi memberikan pelayanan umum dalam suatu wilayah tertentu, Pemerintah memiliki semua atau sebagian besar cirri-ciri: wilayah yang dibatasi, suatu populasi, suatu organisasi yang berkelanjutan, otoritas untuk melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah serta menagih pajak dan retribusi, disamping hal-hal lain sebagai kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah di atasnya”. Sementara Ndraha (2003:428) mengatakan pemerintahan terlebih dahulu sebagai suatu kegiatan atau proses yaitu proses penyediaan dan distribusi pelayanan publik yang tidak dapat diprivatisasikan dan layanan sipil kepada setiap orang pada saat dibutuhkan, perilaku kegiatan itulah yang disebut dengan Pemerintah.

Berdasarkan pandangan di atas, Pemerintah dimaknai sebagai cara atau teknik memerintah. Pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Adapun pengertian Ilmu Pemerintahan menurut Syaffie (2010:18) adalah “Ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legeslatif), kepemimpinan dan koordinasi Pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala Pemerintahan secara baik dan benar.

Dalam penjelasan selanjutnya Ndraha (2011:57) mengenai tugas dan fungsi pemerintah yakni “bahwa fungsi itu bersifat objektif sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun fungsi pemerintah ialah fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayaran. Selanjutnya menjelaskan “pemerintahan itu adalah kegiatan pemerintahan, pemerintahan dianggap given, dan kegiatannya itulah dianggap pemerintahan”.

Menurut Widodo (2001:2) bahwa pemerintah local merupakan pemerintahan yang didekatkan dengan rakyat. Dengan demikian pemerintah dapat mengenali kebutuhan yang dibutuhkan rakyat, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat, karena kebijakan yang dibuat akan mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang dilayaninya. Diantara tugas terpenting Negara pada masa kedepannya yang diciptakan oleh lingkungan politik adalah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan mendefinisikan kembali peran pemerintah dalam integrasi sosial, ekonomi, lingkungan, ketentraman dalam masyarakat, menciptakan

komitmen politik, menyediakan infrastruktur, desentralisasi dan demokratisasi pemerintahan, memperkuat finansial serta administrasi pemerintah lokal.

Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa pemerintah mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan dan dalam melaksanakan fungsinya itu pemerintah perlu menetapkan suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

Kemudian menurut Pamudji (1995: 25-26) pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional), sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajaran dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.

### **3. Konsep Pemerintah Daerah**

#### **a. Pengertian Pemerintah Daerah**

Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif) (Syafiie, 2005:21-22).

Menurut C.F. Strong sebagaimana dikutip oleh Syafiie (2005:22) : *Government in the broader sense, is changed with the maintenance of the peace and security of state with in and with out. It must therefore, have first military power or the control of armed forces, secondly legislative power or the means of*

*making law, thirdly financial power of the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending of state and of enforcing the law it makes on the state behalf.*

Samuel Edward Finer dalam Syafiie (2005:3-4), menyatakan bahwa istilah *government*, paling sedikit mempunyai empat arti:

- 1) Menunjukkan kegiatan atas proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atau pihak lain (*the activity or the process of roverning*).
- 2) Menunjukkan masalah-masalah negara dalam mana kegiatan atau proseddi atas dijumpai (*states of affairs*).
- 3) Menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (*people changed with the duty of governing*).
- 4) Menunjukkan cara, metode, atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (*the manner, method or system by witch a particular society is governed*).

Pemerintahan dalam arti luas menurut Carl J. Frederich dalam Tutik (2005:97) adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri. Pemerintahan semata-mata tidak hanya sekedar menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Uraian-uraian di atas dapatlah dirumuskan bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah



oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (Tutik, 2005 :6).

Tujuan adanya lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Lembaga-lembaga tersebut harus dapat membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara (Eddyono, 2010: 16-17).

Menurut Sunarno (2005:5) sistem pemerintahan di Indonesia meliputi:

- 1) Pemerintahan pusat, yakni pemerintah;
- 2) Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- 3) Pemerintahan desa.

#### **b. Prinsip Pemerintah Daerah**

Prinsip-prinsip yang terkait pemerintah daerah merupakan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Konsekuensi logis dari komitmen para *founding fathers* yang memilih sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka melahirkan pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia secara hirarkis struktural terbagi atas pemerintah pusat disatu sisi dan pemerintahan daerah di sisi lainnya. Pemerintah daerah diberi hak dan wewenang untuk mengurus rumah

tangga sendiri (*local self government*), hak dan kewenangan ini dikenal dengan istilah otonomi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki hak dan kewenangan tersebut dikenal dengan sebutan daerah otonom.

Konsep teori dari Pemerintahan Lokal (*local goverment*) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. *Local goverment* bagian negara maka konsep *local goverment* tidak dapat dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan negara dalam sistem *unitary* dan *Federal* serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan (Nurcholis, 2007:13).

Konsep *local goverment* berasal dari barat untuk itu, konsep ini harus dipahami sebagaimana orang barat memahaminya. Bhenyamin Hoessein dalam Nurcholis (2007:1) menjelaskan bahwa *local goverment* memiliki tiga arti. Pertama, berarti pemerintahan lokal. Kedua, pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintahan lokal. Ketiga, berarti daerah otonom.

Dengan demikian pemerintah daerah adalah pemerintah lokal yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingannya sendiri dengan berlandaskan dari prinsip otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan berdasarkan prinsip pembagian tugas antara pusat dan daerah.

#### **4. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah**

##### **a. Pengertian Otonomi Daerah**

Pemberlakuan otonomi daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001 telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi daerah adalah hak,

wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menjelaskan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pengertian itu tidak terlepas dari pengertian otonomi yang dalam konteks politik dan pemerintahan mengandung makna pemerintahan sendiri. Kata “otonomi” berasal dari kata “otonom” yang mempunyai dua pengertian. Pertama, berdiri sendiri; dengan pemerintah sendiri; dan daerah otonom. Kedua, kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri.

Menurut Salam (2007:24) demokrasi di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya diberbagai daerah. Pemerintah daerah menginginkan agar pemerintah pusat menyerahkan sebesar-besarnya urusan yang selama ini ditangani oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai daerah otonomi atau otonomi daerah. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*autos*” yang artinya sendiri dan “*nomos*” yang artinya peraturan. Sehingga otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang kemudian berkembang pengertiannya menjadi menjalankan pemerintahan sendiri.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya

sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Nurcholis, 2007:30). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga mendefinisikan daerah otonom, Pasal 1 ayat (12) menjelaskan, “Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### **b. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah**

Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Widjaja, 2007:133).

Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (Widjaja, 2007:7-8). Prinsip otonomi daerah menurut Abdullah (2007:5) adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip otonomi luas
- 2) Prinsip otonomi nyata



### 3) Prinsip otonomi yang bertanggungjawab

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

## **5. Kewenangan Daerah**

### **a. Pengertian Kewenangan Daerah**

Kewenangan merupakan untuk kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Wasistiono (2008:9) menyatakan bahwa “urusan merupakan himpunan fungsi dalam satu bidang pemerintahan yang didalamnya terkandung adanya hak, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab. Aktivitas tersebut dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan atau oleh masyarakat serta dunia usaha.

Sumber kewenangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis (Wasistiono, 2008) :

- 1) Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya.

Kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbovoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani atau menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri. Kewenangan pemerintahan karena diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan penyerahan wewenangan yang berdasarkan tugas, wewenang untuk memberdayakan daerah termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Artinya bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dimasyarakat. Hal ini jelas akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam pemberian pelayanan.

H.D. Van Wilk/Willem Konijnenbelt dalam Eddyono (2010:35) menjelaskan bahwa delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, sedang mandat terjadi

ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Syarat delegasi adalah tidak terdapat hubungan hirarki (atasan dan bawahan), tetapi menurut Henk van Marseven dalam Eddyono (2010:35) atas dasar konstitusi, dapat dibenarkan dalam beberapa hal pendelegasian oleh pembuat peraturan perundang-undangan kepada organ bawahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah, juga memiliki kewenangan tersendiri yang bersifat atributif dalam segala bidang seperti pemerintah pusat kecuali: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengeluarkan peraturan sendiri khusus untuk daerahnya sendiri yang kemudian dikenal dengan Peraturan Daerah (PERDA).

#### **b. Sifat kewenangan Daerah**

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Menurut Mahkamah Konstitusi, kewenangan kepala daerah sangatlah berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah, karena kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah, tentunya akan sangat tidak tepat apabila kewenangan

kepala daerah tidak dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah (Eddyono, 2010 :27).

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi dan agama. Urusan pemerintahan yang dijalankan secara *concurrent*, yakni penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dilaksanakan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya terhadap urusan yang bersifat *concurrent* tersebut terdapat pembagian, yakni ada bagian yang penyelenggaraan otonomi daerah mensyaratkan adanya pembagian urusan ditangani pemerintah, dan ada bagian yang ditangani oleh pemerintah provinsi serta bagian yang ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota (Morangki, 2012 : 63).

## 6. Teori Peranan

Peranan dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah disusun secara tegas akan memudahkan birikrasi pemerinthan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya disfungsi birikrasi sebagai akibat struktur yang



tidak rasional, tidak diperlengkapi oleh pegawai yang betul-betul profesional. Menurut Ndraha (2003:53) peranan diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiapjenjang pemerintahan.

Menurut pendapat Soekanto (2004:244) Peranan dapat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sementara menurut Ndraha (2003:253) Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau lebih telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan. Menurut Soekanto (2004: 243) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan dapat diartikan sebagai pelaksanaan hak dan kewajibannya atas kedudukan atau fungsinya atas jabatan di pemerintahan ataupun di lingkungan masyarakat secara dinamis dan terukur.

Menurut Knott dan Miller dalam Kumorotomo (2002;284) bahwa terdapat empat macam persoalan yang dihadapi dalam birokrasi pemerintahan yaitu :

1. Daur kekakuan aturan (*regidli cycle*): struktur yang kurang Fleksibel, birokrasi cenderung membatasi kapasitas kognitif dari aparat-aparatnya. Birokrasi sering ragu-ragu bertindak karena sistem senioritas dan aturan yang kaku.
2. Pengalihan sasaran (*goal displancement*): kelemahan manajerial sering kali tidak berhasil memotifasi individual untuk mencapai tujuan, sebaliknya system tersebut hanya merangsang untuk mengikuti aturan-aturan hirarkis dan prosedur-prosedur standar operasi (*standard operation procedure*).
3. Kurangnya kapasitas personil terlatih (*skilled incapacity*): kemampuan personil dalam melihat tugas-tugasnya dalam kerangka proses organisasi secara keseluruhan.
4. Sistem kewenangan berganda (*dual system of authority*): ketidak sephaman antar pakar menentang otoritas hirarkis dari seorang atasan yang awan yang terjadi seringkali bukan karena tidak sepham tetapi lebih kepada otoritas professional.

Dengan demikian peranan merupakan sikap yang ditunjukkan baik itu individu maupun organisasi dalam menjalankan fungsinya pada tatanan yang dijalani. Peranan menjadi bagian penting untuk disikapi keberadaan dari status individu maupun organisasi dalam menanggapi suatu permasalahan.

## 7. Pembinaan

Menurut Thoha (2011:207) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya

kemajuan, peningkatan, perubahan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Pembinaan selain menekankan aspek rasionalitas dan teknikal, juga sangat memberikan perhatian pada hubungan kemanusiaan dan kebutuhan sosialnya.

Menurut Widjaja (2001:139) mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha perbaikan, dan akhirnya mengembangkan, dengan demikian pembinaan adalah sejauh mana usaha dari kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin.

Pembinaan menurut Winkel (2002:29) disebutkan bahwa pembinaan adalah bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar dia mencapai kedewasaan. Secara sederhana pembinaan merupakan suatu aktivitas sadar dari orang dewasa guna membantu dan membimbing orang yang belum dewasa agar menjadi dewasa, baik jasmani maupun rohani.

Selain itu menurut Efendi (2003:24) disebutkan bahwa pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan perbaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk di dalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.

Mangunhardjana (2004:17) mengatakan bahwa unsur-unsur dalam pembinaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Isi sesuai dengan tingkat perkembangan dan pengetahuan para peserta pembinaan maupun berhubungan dengan pengalaman mereka.
2. Isi tidak selalu teoritis, tetapi praktis dalam arti dapat dibahas dan dikembangkan dari berbagai pandangan dan pengalaman para peserta, dapat di praktekan dalam kehidupan nyata.
3. Isi tidak terlalu banyak, tetapi disesuaikan dengan daya tangkap peserta dengan waktu yang tersedia.

Penyalahgunaan bisa dihindari, jika aparaturnya sebagai pelaksana dalam menjalankan tugas pemerintah secara konsisten menyadari tugasnya. Supriyatno (2009:183) memberikan 12 langkah strategis untuk melaksanakan manajemen pemerintah yang baik yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran
2. Mereformasi birokrasi
3. Manajemen pemerintahan yang baik dan konsisten
4. Melaksanakan akuntabilitas
5. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan
6. Meningkatkan profesionalisme
7. Meningkatkan kinerja
8. Meningkatkan pelayanan
9. Meningkatkan budaya kerja
10. Meningkatkan peran masyarakat



11. Mengefektifkan anggaran
12. Melaksanakan desentralisasi.

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Situmorang (1994: 176) mengatakan pembinaan pegawai dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, semangat dan gairah kerja, disiplin dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab dan tidak mempunyai sikap dan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugas, oleh karena itu pelaksanaannya harus terus berkesinambungan.

Adapun indikator variabelnya menurut Santoso (2005: 52) pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Agar pembinaan dapat berjalan baik, maka dilakukan beberapa cara:

- a. Pemberian bimbingan
- b. Memberikan pengarahan
- c. Memberikan pendidikan dan pelatihan
- d. Memberikan instruksi-instruksi
- e. Memberikan buku petunjuk

Sedangkan menurut Thoha (2011:207) pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain:

- a. Penyuluhan
- b. Pengarahan

### c. Bimbingan

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa pembinaan merupakan proses pemberian peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam suatu kegiatan melalui penyuluhan, pengarahan, dan bimbingan.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Konsep Teori	Indikator	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1	Andi Fitrah P. Putra. <i>Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan</i> Volume 7, Nomor 2, Juli 2014 (127-136) ISSN 1979-5645	Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Pengentasan Kemiskinan pada program UEP dan KUBE	Manajemen pemerintahan berarti penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian bidang tatakelola pemerintahan. Supriyanto (2009:41),	1. Komunikasi; 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur birokrasi	Terdapat persamaan meneliti pada Dinas Sosial. Sementara perbedaan terletak pada konsep teori dan indikator yang digunakan
2	Chandra Rizal. Jom FISIP Volume. 2 No. 2 Oktober 2015.	Peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Tahun 2013	Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan	1. Kebijakan 2. Koordinasi	Terdapat persamaan meneliti pada Dinas Sosial. Sementara perbedaan terletak pada konsep teori dan indikator yang digunakan

1	2	3	4	5	6
			<p>harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. (Friedman, M, 1998 : 286 )</p>		
3	<p>Marlina Damuhu. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan EKSEKUTIF Volome 1 No. 1 Tahun 2018 ISSN : 2337 – 5736</p>	<p>Peran Pemerintah Kota Manado Dalam Mengatasi Masalah Sosial Terhadap Pengemis (Studi di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)</p>	<p>Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). (Soekanto, 2004:243)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya pemerintah;</li> <li>2. Anggaran yang disediakan</li> <li>3. Mengatasi masalah serta cara mengatasi kendala yang ada;</li> <li>4. Upaya pengorganisasian</li> </ol>	<p>Terdapat persamaan meneliti pada Dinas Sosial. Sementara perbedaan terletak pada konsep teori dan indikator yang digunakan</p>
4	<p>Suhardi, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik JISIP:Vol. 2, No. 1 (2013) ISSN. 2088-7469</p>	<p>Peran Dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Perlindungan Dan Pembinaan Anak Jalanan</p>	<p>Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). (Soekanto, 2004:243)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan</li> <li>2. Anggaran</li> <li>3. Target dan Realisasi</li> <li>4. Dampak</li> </ol>	<p>Terdapat persamaan meneliti pada Dinas Sosial. Sementara perbedaan terletak pada konsep teori dan indikator penelitian</p>

1	2	3	4	5	6
5	Ahmad Imaduddin (eJournal Administrative Reform, Volume 4, Nomor 3, 2016: 351-362)	Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin Binaan Dinas Sosial Wilayah Kecamatan Samarinda Utara Di Kota Samarinda	James E. Anderson dalam Subarsono (2009:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.	a. Sosialisasi Program b. Mekanisme Prosedur Penyaluran Dana c. Kinerja Pendampingan KUBE d. Efektivitas Program pada kelompok sasaran	Terdapat persamaan meneliti pada Dinas Sosial. Sementara perbedaan terletak pada konsep teori dan indikator yang digunakan
6	Lidia Nugrahaningsih Ayal (Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 39, No. 1, Maret 2015, 43-53)	Peran Pendamping Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin: Studi pada Pendamping Kube FM di Kota Banjarmasin	Pembentukan Kube adalah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan melalui upaya peningkatan kemampuan berusaha pada anggota secara bersama dalam kelompok, peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha, serta peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota Kube dengan masyarakat sekitar.	a. Sosial b. Ekonomi c. Kelembagaan	Terdapat persamaan meneliti pada Dinas Sosial. Sementara perbedaan terletak pada konsep teori dan indikator yang digunakan



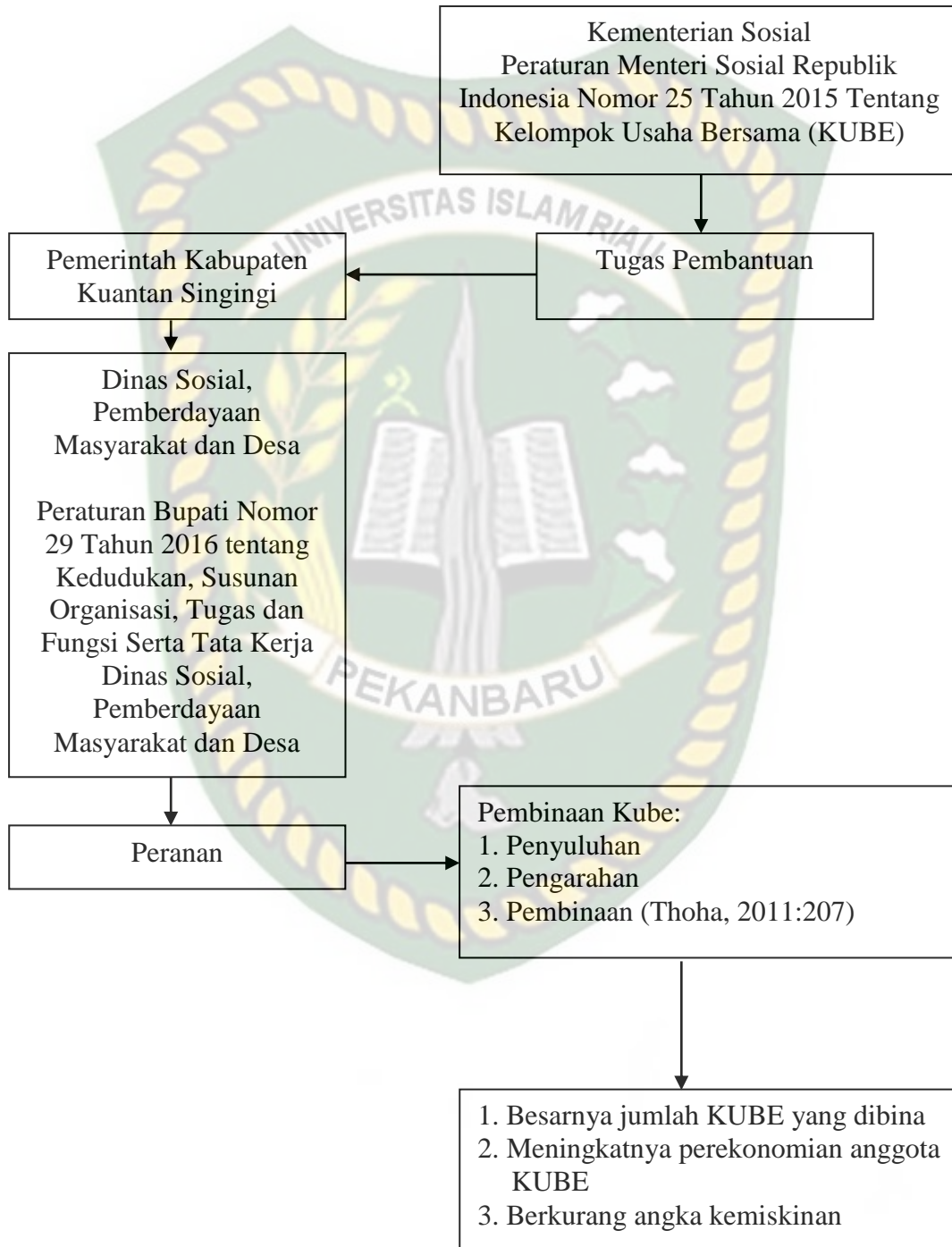
1	2	3	4	5	6
7	Muslim Sabarisman ( <i>SOSIO KONSEPSIA Vol. 4, No. 03, Mei - Agustus, Tahun 2015</i> )	Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Sukabumi	Peran daerah dalam kaitannya dengan penyediaan pelayanan kepada masyarakat masih jauh dari yang diharapkan (Suradi, 2011).	a. Permasalahan kemiskinan b. Peran Dinas Sosial c. Kendala	Terdapat persamaan meneliti pada Dinas Sosial. Sementara perbedaan terletak pada konsep teori dan indikator yang digunakan
8	Purnama Sari (MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017))	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera	Kemiskinan adalah suatu kondisi yang menggambarkan ketidakmampuan orang baik sebagai individu maupun kelompok untuk memenuhi hak-hak dasar secara layak dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.	a. Kelembagaan b. Pendamping c. Pengetahuan	Terdapat persamaan meneliti pada Dinas Sosial. Sementara perbedaan terletak pada konsep teori dan indikator yang digunakan
9	Ace Lingga Jati (2013)	Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Lingga (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Lingga)	pentingnya fungsi pemberdayaan bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui rangkaian program yang disusun pemerintah dan direalisasikan	a. Psikologis b. Struktural	Terdapat persamaan meneliti pada Dinas Sosial. Sementara perbedaan terletak pada konsep teori dan indikator yang digunakan
10	Evi Fitriani (2015)	Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan	Evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, mengumpulkan	a. Hasil kebijakan b. Dampak kebijakan c. Dampak hasil kebijakan	

1	2	3	4	5	6
		Masyarakat Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan	informasi tentang cara kerja sesuatu selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program dalam pengambilan keputusan		

### C. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Membina Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin (Studi di Kecamatan Kuantan Tengah), kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut :

Gambar. II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Membina Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin (Studi di Kecamatan Kuantan Tengah)



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020

#### D. Konsep Operasional Variabel

Guna menghindari dari kekeliruan dalam penggunaan istilah di dalam penulisan ini, maka berikut ini penulis akan menuangkan konsep-konsep yang telah dipaparkan sebelumnya dalam bentuk nyata secara operasionalnya tentang hasil kajian sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Permusyawatan Daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah salah satu instansi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang diberikan kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap KUBE dan berada di bawah Bupati Kuantan Singingi.
- c. Peranan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan dinas dalam penelitian ini ditelusuri berdasarkan konsep teori kepemimpinan birokrasi.
- d. Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Membina Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Kecamatan Kuantan Tengah, dalam penelitian ini diukur dengan menetapkan indikator sebagai berikut:



- 1) Penyuluhan dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program KUBE yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Pengarahan dalam penelitian ini adalah pengarahan-pengarahan yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat yang sudah tergabung dalam KUBE dan menerima bantuan.
- 3) Bimbingan dalam penelitian ini adalah bimbingan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan peningkatan usaha KUBE untuk mencapai hasil yang maksimal.

#### E. Operasionalisasi Variabel

Adapun operasional variabel dari penelitian sebagai berikut :

Tabel II.2 Operasional Variabel Tentang Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Membina Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin (Studi di Kecamatan Kuantan Tengah)

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia	Membina KUBE	Penyuluhan	a. Melakukan sosialisasi KUBE b. Menyampaikan prosedur pembentukan KUBE c. Mengajak masyarakat membentuk KUBE
		Pengarahan	a. Penerapan teknologi tepat guna b. Memberikan bantuan manajerial atau pengelolaan usaha c. Menjalinkan hubungan kerjasama atau kemitraan

1	2	3	4
menjalankan suatu peranan. (Soekanto, 2002:243)		Bimbingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong pengembangan pemasaran KUBE</li> <li>b. Mempermudah bantuan modal kerja</li> <li>c. Meningkatkan kualitas SDM</li> <li>d. Memberi solusi atau jalan keluar memperoleh bahan baku</li> </ul>

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variabel yang diteliti dalam penelitian. Menurut Kountur (2005;105) yang mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang di teliti. Kemudian melalui pendekatan kualitatif, Creswell (1994:1) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan, informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berada di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, dengan alasan pemilihan lokasi belum seluruh KUBE yang terdaftar berada di Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan memperoleh pengembangan dan pembinaan dari pemerintah daerah dan terdapat jumlah KUBE yang beranggotakan masyarakat berekonomi mampu. Ditetapkannya lokasi penelitian di Kecamatan Kuantan Tengah dikarenakan jumlah dan jenis KUBE yang paling banyak dibandingkan kecamatan lainnya.

### C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki kapasitas dan memahami permasalahan yang diteliti, sehingga bisa memberikan jawaban atas permasalahan yang ada. Informan yang dimaksud tersebut yaitu seluruh pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dan Ketua KUBE di Kecamatan Kuantan Tengah.

Tabel III.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi	1	Informan Kunci
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	1	Informan tambahan
3.	Tenaga Pendamping Kecamatan	1	Informan tambahan
4.	KUBE di Kecamatan Kuantan Tengah	4	Informan tambahan

Sumber : Data Modifikasi, 2020

### D. Teknik Penetapan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2012: 97) *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dengan demikian jelaslah bahwa jumlah informan bisa bertambah jika informasi yang diperoleh belum memuaskan untuk menjawab permasalahan penelitian.

### E. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :



- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berkenaan dengan pembinaan KUBE.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dan melalui riset kepustakaan meliputi :
  1. Gambaran umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi
  2. Jumlah pegawai
  3. Tingkat pendidikan pegawai
  4. Program Pembinaan KUBE
  5. Jumlah KUBE
  6. Jenis KUBE

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Menurut Riduwan (2013:30) observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan. Pengamatan dilakukan berupa aktivitas aktivitas pemerintah dalam memberikan pembinaan KUBE dan perkembangan KUBE.

## 2. Wawancara

Riduwan (2013:29) adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memberikan informasi langsung dari sumbernya. Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden/partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki. Adapun wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, dan beberapa orang Ketua KUBE di Kecamatan Kuantan Tengah.

## 3. Dokumentasi

Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

## G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif.

Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk mensinkronkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan alur ini data akan disederhanakan untuk melihat keterkaitan, kategori dan

sifat data sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan tepat. Adapun penjelasan mengenai komponen tersebut menurut Miles dan Huberman (2014:16-19), yaitu:

1. Tahap pengumpulan data: peneliti akan melakukan proses aktivitas pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi disesuaikan dengan persoalan penelitian yang sedang dibahas.
2. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data bukanlah suatu hal yang tersusah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaannya penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam

suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin

4. Menarik kesimpulan/verifikasi adalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”, atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

## **H. Jadwal Penelitian**

Adapun jadwal penelitian yang ditetapkan sebagai gambaran pelaksanaan penyusunan penelitian sebagai berikut:



Tabel III.2. Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Membina Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin (Studi di Kecamatan Kuantan Tengah)

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019/2020/2021																											
		Desember				Januari				Oktober				November				Desember				Januari							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x																						
2	Seminar UP											x																	
3	Perbaikan UP											x	x																
4	Perbaikan daftar kuisisioner															x													
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)															x	x												
6	Penelitian Lapangan																			x									
7	Penelitian dan analisis data																			x	x								
8	Penyusunan laporan Penelitian (Skripsi)																				x								
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																							x	x				
10	Ujian Skripsi																								x				
11	Refisi dan Pengesahan skripsi																										x	x	
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																												x

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

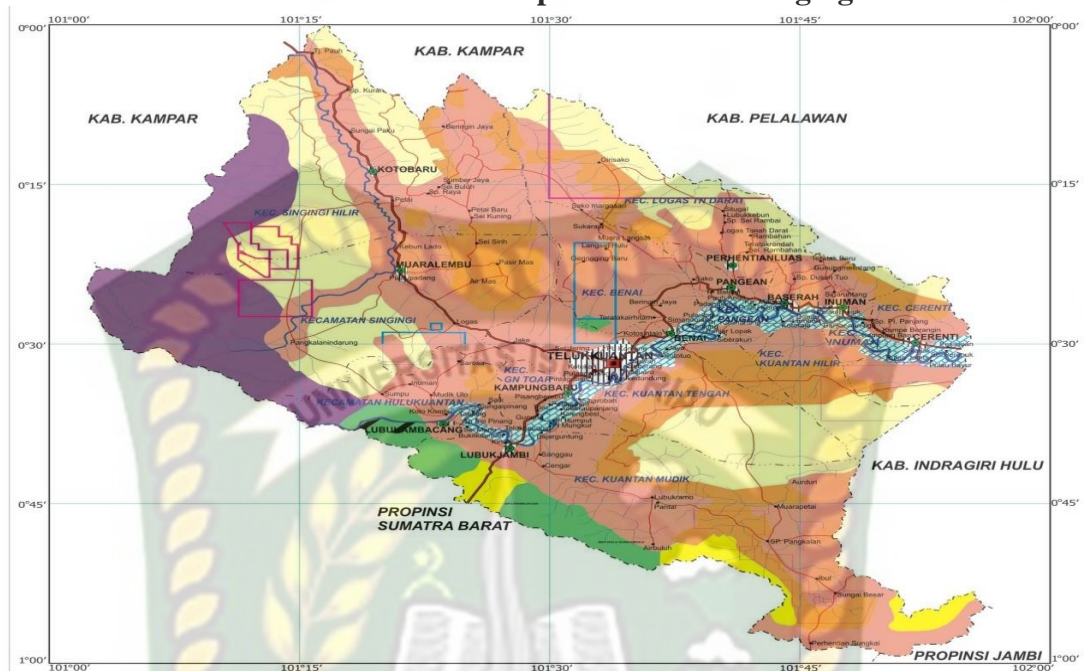
#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi**

##### **1. Kondisi Geografis dan Topografi**

Kabupaten Kuantan Singingi terletak di bagian selatan Provinsi Riau, dengan posisi 0°00 Lintang Utara sampai 1°00 Lintang Selatan dan antara 101°02 sampai 101°55 Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah ± 7.656 Km<sup>2</sup> (763,603 Ha) atau 7,81% dari total luar Provinsi Riau dengan jarak dari laut berkisar ± 120 Km dengan ketinggian berkisar 25-30° dari permukaan laut yang berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Gambar IV.1 Peta Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber: Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi Tahun 2019

Berikut rincian luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan kecamatan dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel IV.1. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Pucuk Rantau	821.64
2	Kuantan Mudik	564.28
3	Hulu Kuantan	384.40
4	Gunung Toar	165.25
5	Kuantan Tengah	270.74
6	Sentajo Raya	145.7
7	Benai	124.66
8	Pangean	145.32
9	Logas Tanah Darat	380.34
10	Kuantan Hilir	148.77
11	Kuantan Hilir Seberang	114.29
12	Inuman	450.01
13	Cerenti	456.00
14	Singingi	1.953,66
15	Singingi Hilir	1.530.97
Jumlah		7.656.03

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa luas wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu mencapai 7.656.03 km<sup>2</sup>. Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi Terdiri dari 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Singingi dengan luas 1.953.66 km<sup>2</sup> sedangkan kecamatan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan luas wilayah 114.29 km<sup>2</sup>.

## 2. Kondisi Demografi

### a. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2017 sebanyak 310.619 jiwa. Yang terdiri dari 159.480 laki-laki dan 151.139 perempuan. Dengan laju sex ratio sebesar 107. Dengan luas wilayah 7.656,03 km<sup>2</sup>. Rata-rata kepadatan penduduk setiap 1 km<sup>2</sup> sebanyak 40 jiwa yang bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pucuk Rantau	5895	5040	10935
2	Kuantan Mudik	11549	11329	22878
3	Hulu Kuantan	4386	4191	8577
4	Gunung Toar	6807	6699	13496
5	Kuantan Tengah	23981	22971	46722
6	Sentajo Raya	14293	13595	27888
7	Benai	7900	7922	15822
8	Pangean	9085	9163	18248
9	Logas Tanah Darat	10535	9620	20155
10	Kuantan Hilir	7414	7325	14739
11	Kuantan Hilir Seberang	6502	6428	12930
12	Inuman	7680	7623	15303
13	Cerenti	7612	7336	14948
14	Singingi	16284	14524	30722
15	Singingi Hilir	19593	17563	37156
Jumlah		159,480	151,139	310,619

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2019



Dari tabel di atas kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi terletak pada Kecamatan Kuantan Tengah dengan jumlah penduduk mencapai 46.722 jiwa dan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduknya yang terkecil adalah Kecamatan Hulu Kuantan dengan jumlah penduduk berkisar 8.577 jiwa.

## b. Kondisi Sosial Budaya

### 1) Tingkat Pendidikan

Jumlah sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang tersebar di seluruh Kecamatan yang ada yang di rincikan sebagai berikut:

Tabel IV.3. Jumlah Sarana Pendidikan Di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA/SMK	Universitas
1	Pucuk Rantau		7	5	1	
2	Kuantan Mudik	13	21	6	2	
3	Hulu Kuantan	4	9	2	1	
4	Gunung Toar	8	12	4	1	
5	Kuantan Tengah	27	30	7	6	1
6	Sentajo Raya		22	7	2	
7	Benai	22	18	4	2	
8	Pangean	16	19	5	2	
9	Logas Tanah Darat	12	17	4	3	
10	Kuantan Hilir	15	12	4	1	
11	Kuantan Hilir Seberang		10	2	1	
12	Inuman	10	16	6	1	
13	Cerenti	9	12	3	2	
14	Singingi	19	18	5	2	
15	Singingi Hilir	19	21	6	4	
	Jumlah	162	242	70	31	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

### 2) Keagamaan

Di Kabupaten Kuantan Singingi kehidupan antar umat beragama berjalan dengan harmonis, di mana terdapat bermacam-macam agama yang dianut

masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu dan Budha di mana dari mayoritas penduduk Kabupaten Kuantan Singingi 99,27% beragama Islam dengan jumlah rumah Ibadah sebanyak 198 Mesjid dan 5 Gereja.

## **B. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi**

### **1. Visi dan Misi**

Visi

“Terwujudnya efektivitas penanganan masalah kesejahteraan sosial dan bencana didukung oleh meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa”

Misi :

1. Meningkatkan kinerja aparatur dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa
2. Membangun kemitraan dan kerja sama yang harmonis dengan lembaga sosial
3. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
4. Perwujudan masyarakat sosial dan lembaga sosial yang berkualitas dan bermartabat
5. Penanganan Bencana yang tanggap, Cepat dan Tepat

### **2. Kedudukan dan Kewangan**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang

Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kewenangan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Bidang Sosial:

1. Pemberdayaan sosial KAT;
2. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten;
3. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten;
4. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten;
5. Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasih di Daerah kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal;
6. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
7. Pemeliharaan anak-anak terlantar;
8. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten;
9. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten;

10. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiap siagaan bencana kabupaten;
  11. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
1. Penyelenggaraan penataan Desa;
  2. Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
  3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
  4. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten;
  5. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

### 3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Program;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:



1. Seksi Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial;
  2. Seksi Penanggulangan Kemiskinan;
  3. Seksi Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- d. Bidang Jaminan Sosial, Bencana, dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  2. Seksi Penanganan Bencana;
  3. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- e. Bidang Pemberdayaan Desa, membawahkan:
1. Seksi Penataan dan Kerjasama Desa;
  2. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa;
  3. Seksi Keuangan Aset Desa.
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
  2. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Desa;
  3. Seksi Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Hukum Adat.

#### **4. Bidang Pemberdayaan Sosial**

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Sosial;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pemberdayaan Sosial;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Sosial;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Sosial;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **4. Seksi Penanggulangan Kemiskinan**

Seksi Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan. Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Penanggulangan Kemiskinan;

- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
  - e. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan Penanggulangan Kemiskinan;
  - f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Penanggulangan Kemiskinan;
  - g. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (4) Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh fungsional umum.

Rincian tugas Seksi Penanggulangan Kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial;
- d. Melaksanakan pemberian arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- e. Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karir;
- f. Melaksanakan penanggulangan kemiskinan dan memberikan bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- g. Menyelenggarakan Bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- h. Menyelenggarakan Bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- i. Menyelenggarakan Bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- j. Menyelenggarakan Bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Sarana Lingkungan (SARLING);
- k. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis syarat-syarat bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- l. Melaksanakan monitoring dan Evaluasi terhadap bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- m. Melaksanakan Sosialisasi Bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- n. Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi dengan Kepala Seksi dan Bidang lainnya
- o. Membantu penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);



- p. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Membina Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Kecamatan Kuantan Tengah

Peran pemerintah sangat dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk mengetaskan kemiskinan tersebut maka dibutuhkan program-program kerja yang kegiatannya menjurus langsung ke objek yang dituju. Di mana salah satu program yang diupayakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah dengan menjalankan program yang bisa dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Program pengentasan kemiskinan tidak hanya bisa dilakukan dengan hanya melakukan sesaat saja, tetapi perlu program yang bisa dilakukan berkelanjutan yang saat ini adalah program KUBE.

Mengenai masalah KUBE yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi menurut hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Napisman, M.Si selaku Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai program KUBE ini :

*“KUBE merupakan salah satu program penting yang dijalankan dalam memberdayakan masyarakat miskin. Bentuk pemberdayaan pada program KUBE meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan memberikan bantuan permodalan agar anggota kelompok mampu meningkatkan pendapatan dan mengubah memperbaiki perekonomian keluarganya. Dalam KUBE ini seluruh anggota berasal dari masyarakat setempat yang memiliki kesepakatan bersama untuk menjalankan berbagai kegiatan yang didukung oleh program KUBE”* (Wawancara tanggal 20 Maret 2020)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa program KUBE merupakan salah satu program penting yang dijalankan Dinas Sosial dalam memberdayakan masyarakat miskin dan upaya mengentaskan angka kemiskinan di

masyarakat. Bentuk pemberdayaan pada program KUBE meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan memberikan bantuan permodalan agar anggota kelompok mampu meningkatkan pendapatan dan mengubah memperbaiki perekonomian keluarganya.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nia Kunita, S.Sos. M.Si selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, diperoleh informasi bahwa:

*“Pemberdayaan masyarakat melalui program KUBE merupakan salah satu langkah konkret yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program KUBE masyarakat secara berkelompok bisa memulai kegiatan perekonomian untuk menyumbang penghasilan bagi keluarganya melalui bantuan dari pemerintah daerah dari segi pendanaan, pengelolaan, dan manajemen, dan pemasaran produk yang dihasilkan, serta dilakukan evaluasi secara kontinu oleh pendamping yang ada”* (Wawancara tanggal 21 Maret 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah daerah adalah melalui program KUBE yang merupakan salah satu langkah konkret untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program KUBE masyarakat secara berkelompok bisa memulai kegiatan perekonomian untuk menyumbang penghasilan bagi keluarganya melalui bantuan dari pemerintah daerah dari segi pendanaan, pengelolaan, dan manajemen, dan pemasaran produk yang dihasilkan, serta dilakukan evaluasi secara kontinu oleh pendamping yang ada.

Pemberdayaan masyarakat melalui program KUBE merupakan salah satu langkah konkret yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program KUBE

masyarakat secara berkelompok bisa memulai kegiatan perekonomian untuk menyumbang penghasilan bagi keluarganya melalui bantuan dari pemerintah daerah dari segi pendanaan, pengelolaan, dan manajemen, dan pemasaran produk yang dihasilkan, serta dilakukan evaluasi secara kontinu oleh pendamping yang ada.

Program KUBE merupakan salah satu program penting yang dijalankan Dinas Sosial dalam memberdayakan masyarakat miskin dan upaya mengetaskan angka kemiskinan di masyarakat. Bentuk pemberdayaan pada program KUBE meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan memberikan bantuan permodalan agar anggota kelompok mampu meningkatkan pendapatan dan mengubah memperbaiki perekonomian keluarganya. Program KUBE yang merupakan salah satu langkah konkret untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program KUBE masyarakat secara berkelompok bisa memulai kegiatan perekonomian untuk menyumbang penghasilan bagi keluarganya melalui bantuan dari pemerintah daerah dari segi pendanaan, pengelolaan, dan manajemen, dan pemasaran produk yang dihasilkan, serta dilakukan evaluasi secara kontinu oleh pendamping yang ada.

Adapun tujuan dari program kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE) yang ditetapkan oleh kementerian sosial yang diarahkan kepada upaya percepatan penghapusan kemiskinan, yaitu :

- 1) Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok,
- 2) Peningkatan pendapatan,



- 3) Pengembangan usaha,
- 4) Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial di antara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar.

Wawancara dengan Bapak Drs. Napisman, M.Si selaku Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai program KUBE ini :

*“Tujuan terbentuknya KUBE ini yaitu untuk memberdayakan masyarakat miskin, sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang menunjang kualitas hidup mereka. Dan tujuan lainnya yaitu untuk menumbuhkan kembali rasa kebersamaan di dalam masyarakat, agar dalam menjalankan usaha yang dibentuk bersama akan berjalan dengan maksimal, yang nantinya dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten”* (Wawancara tanggal 20 Maret 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program KUBE ini adalah memberdayakan masyarakat miskin dalam rangka mengurangi dan menghapus kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga miskin. Untuk mendapatkan bantuan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah, maka setiap KUBE yang telah dibentuk harus memiliki izin yang diterbitkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nia Kunita, S.Sos. M.Si selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, diperoleh informasi bahwa:

*“Tujuan dibentuknya program KUBE adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kelompok-kelompok KUBE yang dibentuk dalam taraf perekonomian yang sama yakni masyarakat yang belum mampu mendapatkan perekonomian yang baik dalam artikata masih dibawah garis miskin. Untuk itu diperlukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin agar mampu mengubah keadaan ekonomi keluarga menjadi lebih baik dari sebelumnya setelah mengikuti program KUBE”* (Wawancara tanggal 21 Maret 2020)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa tujuan dibentuknya program KUBE adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kelompok-kelompok KUBE yang dibentuk dalam taraf perekonomian yang sama yakni masyarakat yang belum mampu mendapatkan perekonomian yang baik dalam artian masih dibawah garis miskin. Untuk itu diperlukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin agar mampu mengubah keadaan ekonomi keluarga menjadi lebih baik dari sebelumnya setelah mengikuti program KUBE.

KUBE dibentuk untuk memberdayakan masyarakat miskin, sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang menunjang kualitas hidup mereka. Dan tujuan lainnya yaitu untuk menumbuhkan kembali rasa kebersamaan di dalam masyarakat, agar dalam menjalankan usaha yang dibentuk bersama akan berjalan dengan maksimal, yang nantinya dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada salah satunya di Kabupaten Kuantan Singingi

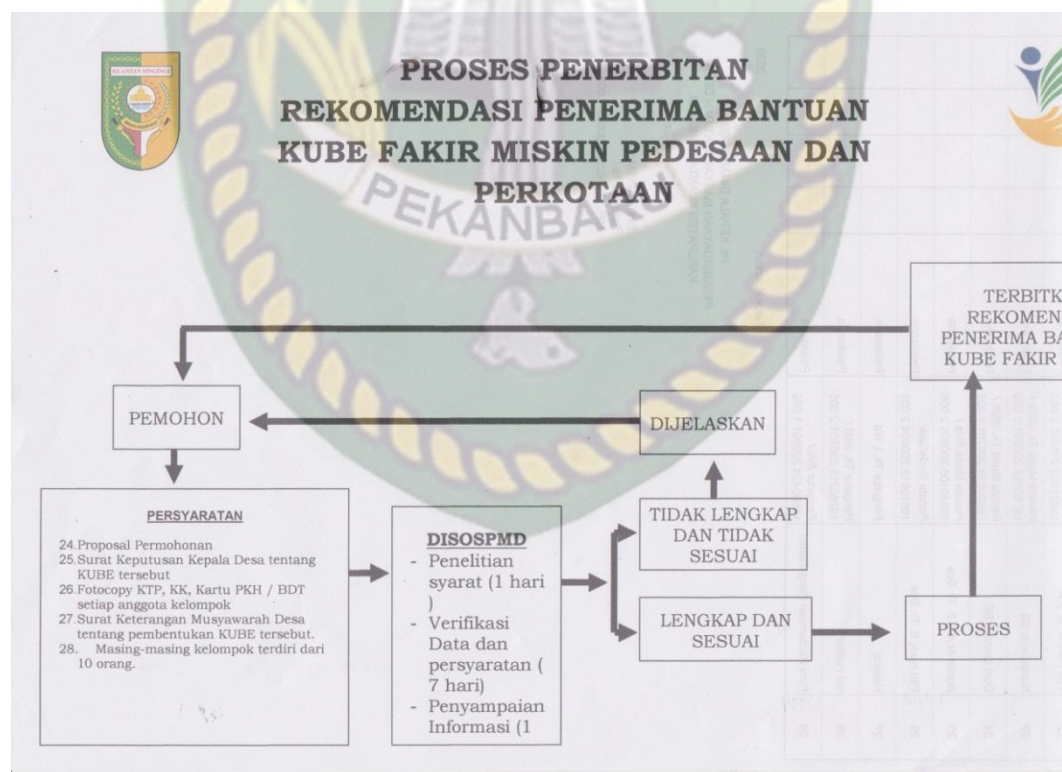
Tujuan dari program KUBE ini adalah memberdayakan masyarakat miskin dalam rangka mengurangi dan menghapus kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga miskin. Kelompok-kelompok KUBE yang dibentuk dalam taraf perekonomian yang sama yakni masyarakat yang belum mampu mendapatkan perekonomian yang baik dalam artian masih dibawah garis miskin. Untuk itu diperlukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin agar mampu mengubah keadaan ekonomi keluarga menjadi lebih baik dari sebelumnya setelah mengikuti program KUBE. Untuk mendapatkan bantuan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah, maka setiap KUBE yang telah dibentuk

harus memiliki izin yang diterbitkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

Di mana alur yang harus ditempuh setiap kelompok KUBE untuk mendapatkan bantuan dari program KUBE adalah dengan memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut:

### 1. Persyaratan:

- Proposal Permohonan
- Surat Keputusan Kepala Desa Tentang KUBE tersebut
- Foto Copy KTP, Kartu Keluarga, Kartu PKH/ BDT Setiap Anggota Kelompok
- Surat Keterangan Musyawarah Desa tentang pembentukan KUBE tersebut.
- Masing-masing kelompok terdiri dari 10 – 20 orang



### 2. Keterangan Alur

- Pemohon
- Melengkapi Persyaratan



- diajukan kepada DISOSPMD - Penelitian Syarat (1 Hari) -Verifikasi Data dan Persyaratan (7 Hari) -Penyampaian Informasi (1 Hari)
- persyaratan sudah lengkap dan sesuai
- Proses
- Terbitkan Rekomendasi Penerima Bantuan KUBE fakir miskin
- Masa penyelesaian 9 hari dan tidak dipungut biaya

Kelompok KUBE yang telah dibentuk dalam masyarakat tidak serta merta memiliki legalitas, tetapi membutuhkan pengurusan administrasi ke instansi terkait agar terdaftar sebagai salah satu kelompok KUBE. Setelah mendapatkan legalitas sebagai kelompok KUBE, barulah kemudian kelompok tersebut terdaftar sebagai salah satu kelompok KUBE yang ada di wilayah kerja Kabupaten Kuantan Singingi dan secara otomatis terdaftar sebagai salah satu kelompok yang bakal menerima bantuan.

Berdasarkan pemaparan secara singkat tentang KUBE, manfaat, dan juga alur permohonan pengurusan izin, maka dapat dalam penelitian ini dapat dijelaskan mengenai peran dari pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan pada KUBE yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun indikator yang ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Penyuluhan**

Sebuah program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah dan melibatkan banyak pihak dalam melaksanakannya. Salah satu program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah program KUBE yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan miskin.

Program KUBE merupakan program yang digagas dari pemerintah pusat dan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten



Kuantan Singingi. Di mana program KUBE dimulai dari melakukan pendataan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri yang kemudian dilakukan pendaftaran di Dinas Sosial atas keberadaan kelompok tersebut.

Wawancara dengan Bapak Drs. Napisman, M.Si selaku Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai program KUBE ini :

*“Program KUBE ini dimulai dari pemberian sosialisasi kepada masyarakat mengenai programnya, cara pembentukannya, dan pemanfaatannya”* (Wawancara tanggal 20 Maret 2020)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa program KUBE di Kabupaten Kuantan Singingi ini dimulai dari adanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan para pegawai dilapangan kepada masyarakat miskin dengan cara pemberian sosialisasi kepada masyarakat mengenai programnya, cara pembentukannya, dan pemanfaatannya. Setelah dilakukan penyuluhan, masyarakat dianjurkan untuk membentuk kelompok KUBE sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nia Kunita, S.Sos. M.Si selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, diperoleh informasi bahwa:

*“Memberikan sosiaslisasi, menyampaikan prosedur pembentukan KUBE, dan tentunya mengajak masyarakat untuk berkelompok membentuk KUBE sesuai dengan kemampuan dan keahlian serta potensi yang dimilikinya.”*(Wawancara tanggal 21 Maret 2020)

Tanggapan di atas memberikan pernyataan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Sosial telah melaksanakan sosiaslisasi, menyampaikan prosedur pembentukan KUBE, dan tentunya mengajak masyarakat untuk berkelompok membentuk KUBE sesuai dengan kemampuan dan keahlian serta potensi yang dimilikinya. Setelah penyuluhan dilakukan diharapkan masyarakat miskin

membentuk kelompok KUBE sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang bisa dilakukan, agar kedepannya kelompok KUBE bisa tumbuh dan berkembang dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan perekonomian para anggotanya.

Begitu juga dengan hasil wawancara bersama Bapak Suherman selaku Pendamping Kecamatan, diperoleh informasi bahwa:

*“KUBE ini awalnya dijalankan dari sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian mengajak masyarakat untuk membentuk kelompok dan mengenali potensinya.”*(Wawancara tanggal 25 Maret 2020)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan telah dilaksanakan penyuluhan yang dilakukan pemerintah mengenai KUBE ini awalnya dijalankan dari sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian mengajak masyarakat untuk membentuk kelompok dan mengenali potensinya.

Wawancara dengan salah seorang ketua Kelompok KUBE di Kuantan Tengah diperoleh informasi bahwa:

*“Telah ada penyuluhan yang diberikan pemerintah beberapa waktu yang lalu. Sampai saat ini penyuluhan tersebut telah memberi kesan kepada kami sehingga terbentuknya kelompok KUBE yang saat ini sedang dijalani.”*(Wawancara tanggal 21 Maret 2020)

Program KUBE di Kabupaten dimulai dari melakukan pendataan kepada masyarakat miskin dan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai program KUBE ini. Kemudian masyarakat yang tertarik dan memiliki kemampuan diharuskan mengumpul beberapa orang yakni 5-10 orang dalam setiap kelompok untuk dibentuk KUBE dan melaporkan kelompoknya kepada Dinas Sosial melalui Pendamping Desa untuk kemudian didaftarkan sebagai salah sekelompok yang ada di wilayah tersebut.

Tabel V.1 Jumlah KUBE di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2017-2019

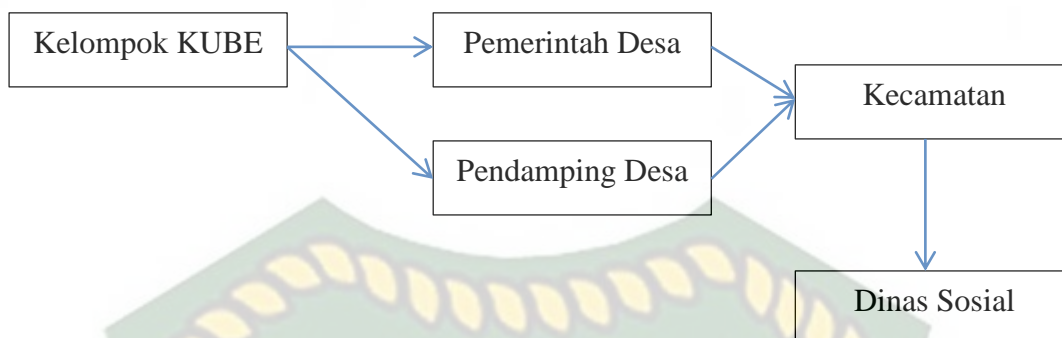
Tahun	Jumlah KUBE	Desa/Kelurahan
2017	8 (78 Kepala Keluarga)	2 Desa 1 Kelurahan
2018	12 (109 Kepala Keluarga)	2 Desa 2 Kelurahan
2019	7 (62 Kepala Keluarga)	1 Desa 2 Kelurahan

Sumber: Pengolahan Data Lapangan, 2020.

Terbentuknya KUBE di Kabupaten Kuantan Singingi tidak terlepas dari peranan Dinas Sosial dalam mensosialisasikan program KUBE bagi masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. Di mana Dinas Sosial melakukan pendataan bagi KUBE yang telah terbentuk dan dimasukkan dalam daftar nama KUBE yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian dilakukan pendataan ulang untuk dilakukan analisis kelayakan penerima bantuan.

Pendataan yang dimulai dari pembentukan KUBE di tingkat desa, kemudian dilakukan pendataan ulang oleh pendamping desa bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tingkat kecamatan yang kemudian dilaporkan ke Dinas Sosial. Pendataan ini dilakukan untuk memastikan jumlah KUBE, jenis usaha KUBE, lokasi KUBE, dan sebagainya, sehingga KUBE yang telah terbentuk dapat benar-benar terdata dan layak untuk menerima bantuan.

Dari pemaparan di atas, maka dapat penulis gambarkan alur dari pendataan KUBE di Kabupaten Kuantan Singingi berikut ini:



Gambaran Pendataan kelompok KUBE, 2020.

Dari alur pendataan yang ada terdapat permasalahan pada jenis pekerjaan dan kemampuan ekonomi anggotanya, sehingga ada beberapa KUBE yang memiliki anggota dengan kemampuan ekonomi yang cukup baik. Padahal anggota KUBE merupakan masyarakat kurang mampu dan miskin dalam hal perekonomian, tetapi dikarenakan pendataan dan analisis tidak mendalam sampai ke tempat tinggal anggota KUBE sehingga faktor ekonomi anggota KUBE ada yang terabaikan. Dengan demikian pada saat melakukan pendataan Dinas Sosial hanya melakukan pendataan melalui laporan ataupun proposal bantuan yang disampaikan Kelompok KUBE, sehingga terdapat ketidaksesuaian keadaan perekonomian kelompok KUBE sebagaimana yang diharapkan.

Kelompok KUBE semestinya berisikan atau beranggotakan masyarakat kurang mampu dan miskin yang memiliki kemahuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarganya. Namun yang terjadi masih terdapat beberapa kelompok KUBE diisi oleh masyarakat dengan perekonomian yang cukup baik.

Di sini terlihat jelas bahwa dari alur dan kondisi perekonomian masyarakat yang tergabung dalam Kelompok KUBE tidak dicantumkan dalam pendataan



kelompok, dikarenakan persyaratan dalam pendataan kelompok KUBE tidak disebutkan pendapatan atau penghasilan dari masing-masing anggota kelompok. Di sinilah letak awal dari terdapatnya anggota kelompok KUBE yang berekonomi cukup baik.

Namun begitu, pendataan dilakukan sebagai landasan awal untuk melakukan penyeleksian kelompok KUBE yang layak menerima bantuan dari Dinas Sosial untuk mendapatkan bantuan dana maupun bantuan keahlian. Penyeleksian dilakukan setelah pendataan dari masing-masing kelompok KUBE yang diajukan ke Dinas Sosial selesai, sehingga pada saat penyeleksian Dinas Sosial bersama pendamping desa turun langsung kelapangan untuk memastikan keberadaan kelompok KUBE, tetapi tetap juga dalam penyeleksian tidak memandang status ekonomi dari anggota kelompok yang ada.

Dengan demikian, secara umum pendataan yang dilakukan pada KUBE di Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik tetapi masih terdapat kelemahan dalam menganalisis lebih lanjut perekonomian setiap anggota KUBE yang terdaftar. Hal ini menyebabkan KUBE yang ada tidak sesuai dengan semangat dan tujuannya yakni meningkatkan perekonomian masyarakat kurang mampu dan miskin.

Program KUBE di Kabupaten Kuantan Singingi ini dimulai dari adanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan para pegawai dilapangan kepada masyarakat miskin dengan cara pemberian sosialisasi kepada masyarakat mengenai programnya, cara pembentukannya, dan pemanfaatannya. Setelah dilakukan penyuluhan, masyarakat dianjurkan untuk membentuk kelompok KUBE sesuai

dengan kemampuan yang dimiliki. Setelah penyuluhan dilakukan diharapkan masyarakat miskin membentuk kelompok KUBE sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang bisa dilakukan, agar kedepannya kelompok KUBE bisa tumbuh dan berkembang dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan perekonomian para anggotanya.

Program KUBE di Kabupaten dimulai dari melakukan pendataan kepada masyarakat miskin dan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai program KUBE ini. Kemudian masyarakat yang tertarik dan memiliki kemampuan diharuskan mengumpulkan beberapa orang yakni 5-10 orang dalam setiap kelompok untuk dibentuk KUBE dan melaporkan kelompoknya kepada Dinas Sosial melalui Pendamping Desa untuk kemudian didaftarkan sebagai salah sekelompok yang ada di wilayah tersebut.

Berdasarkan pemaparan dari penyuluhan kepada masyarakat miskin mengenai KUBE dan pendataan kelompok KUBE yang ada telah dilaksanakan dengan mendatangi langsung kelapangan. Di mana penyuluhan dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pembentukan KUBE dan tujuan dari KUBE tersebut. Sementara pendataan yang dilakukan untuk memastikan keberadaan KUBE yang ada dan dengan kemampuan mengelola potensi yang ada di dalam KUBE.

## **2. Pengarahan**

Setiap KUBE yang telah dibentuk dan di daftarkan kemudian dilakukan penyeleksian kepada masing-masing kelompok yang ada. Setelah diseleksi, maka dipilihlah KUBE yang dianggap layak untuk dibina. Pemberian diklat dilakukan

pada tahun 2017 yakni berupa pelatihan kewirusahaan/manajemen usaha, tahun 2018 pelatihan membatik, pertanian dan manajemen kewirausahaan, tahun 2019 pelatihan manajemen kewirausahaan dan pelatihan bertani.

Wawancara dengan Bapak Drs. Napisman, M.Si selaku Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai program KUBE ini :

*“KUBE yang sudah terbentuk dan terdaftar dilakukan pemilihan atau penyeleksian oleh Dinas Sosial melalui rekomendasi dari masing-masing Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tingkat kecamatan. Di mana dari masing-masing KUBE yang diajukan, dipilih dan ditetapkan oleh Dinas Sosial KUBE mana saja yang diikutsertakan dalam pemberian Diklat, terutama KUBE yang sejenis sesuai program Diklat yang akan dilaksanakan”* (Wawancara tanggal 20 Maret 2020)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan KUBE yang sudah terbentuk dan terdaftar dilakukan pemilihan atau penyeleksian oleh Dinas Sosial melalui rekomendasi dari masing-masing Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tingkat kecamatan. Di mana dari masing-masing KUBE yang diajukan, dipilih dan ditetapkan oleh Dinas Sosial KUBE mana saja yang diikutsertakan dalam pemberian Diklat, terutama KUBE yang sejenis sesuai program Diklat yang akan dilaksanakan.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nia Kunita, S.Sos. M.Si selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, diperoleh informasi bahwa:

*“Dinas Sosial melalui rekomendasi dari masing-masing Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tingkat kecamatan. Di mana dari masing-masing KUBE yang diajukan, dipilih dan ditetapkan oleh Dinas Sosial KUBE mana saja yang diikutsertakan dalam pemberian Diklat, terutama KUBE yang sejenis sesuai program Diklat yang akan dilaksanakan.”*(Wawancara tanggal 21 Maret 2020)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan Dinas Sosial melalui rekomendasi dari masing-masing Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tingkat



kecamatan. Di mana dari masing-masing KUBE yang diajukan, dipilih dan ditetapkan oleh Dinas Sosial KUBE mana saja yang diikutsertakan dalam pemberian Diklat, terutama KUBE yang sejenis sesuai program Diklat yang akan dilaksanakan. Dinas Sosial melalui rekomendasi dari masing-masing Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tingkat kecamatan. Di mana dari masing-masing KUBE yang diajukan, dipilih dan ditetapkan oleh Dinas Sosial KUBE mana saja yang diikutsertakan dalam pemberian Diklat, terutama KUBE yang sejenis sesuai program Diklat yang akan dilaksanakan.

Begitu juga dengan hasil wawancara bersama Bapak Suherman selaku Pendamping Kecamatan, diperoleh informasi bahwa:

*“Selaku Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tingkat kecamatan kami mengusulkan dan mengajukan KUBE yang dibentuk”*(Wawancara tanggal 25 Maret 2020)

KUBE yang sudah terbentuk dan terdaftar dilakukan pemilihan atau penyeleksian oleh Dinas Sosial melalui rekomendasi dari masing-masing Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tingkat kecamatan. Di mana dari masing-masing KUBE yang diajukan, dipilih dan ditetapkan oleh Dinas Sosial KUBE mana saja yang diikutsertakan dalam pemberian Diklat, terutama KUBE yang sejenis sesuai program Diklat yang akan dilaksanakan.

Wawancara dengan salah seorang ketua Kelompok KUBE di Kuantan Tengah diperoleh informasi bahwa:

*“Ada beberapa pengarahan dan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada kelompok KUBE masyarakat miskin ini. Ada dalam bentuk pelatihan keterampilan, beternak, dan manajemen usaha, serta lainnya yang sangat mendukung masih aktifnya kelompok ini.”*(Wawancara tanggal 21 Maret 2020)



Pelaksanaan pemberian Diklat dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan pemateri-pemateri dari ASN yang berkompeten dan juga lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kompetensi dalam memberikan materi Diklat sesuai programnya. Diklat dilakukan setiap tahunnya dengan beragam peningkatan keahlian dan kemampuan kelompok KUBE dengan tujuan agar kelompok KUBE bisa memanfaatkan kemampuan yang ada dalam upaya berusaha meningkatkan perekonomiannya.

Tanggapan di atas memberikan penjelasan KUBE yang sudah terbentuk dan terdaftar dilakukan pemilihan atau penyeleksian oleh Dinas Sosial melalui rekomendasi dari masing-masing Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tingkat kecamatan. Di mana dari masing-masing KUBE yang diajukan, dipilih dan ditetapkan oleh Dinas Sosial KUBE mana saja yang diikutsertakan dalam pemberian Diklat, terutama KUBE yang sejenis sesuai program Diklat yang akan dilaksanakan.

KUBE yang sudah terbentuk dan terdaftar dilakukan pemilihan atau penyeleksian oleh Dinas Sosial melalui rekomendasi dari masing-masing Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tingkat kecamatan. Di mana dari masing-masing KUBE yang diajukan, dipilih dan ditetapkan oleh Dinas Sosial KUBE mana saja yang diikutsertakan dalam pemberian Diklat, terutama KUBE yang sejenis sesuai program Diklat yang akan dilaksanakan.

Pemberian Diklat biasanya dilakukan satu tahun sekali dengan setiap tahunnya memiliki tema yang berbeda, sehingga pelaksanaan diklat ini hanya dapat diikuti oleh Kelompok KUBE tertentu yang sesuai dengan keahlian dan

kemampuan dari anggota KUBE tersebut. Setiap KUBE memiliki spesifikasi dalam bidang tertentu seperti pertanian, peternakan, perdagangan, dan sebagainya, sehingga pada saat Diklat yang diberikan pelatihan hanya pada kelompok KUBE yang sesuai dengan bidang-bidang yang ada.

Diklat dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi dengan anggaran dana yang berasal dari Kabupaten, sehingga Diklat diadakan di Kabupaten Kuantan Singingi itu sendiri. Pemberian Diklat sebelumnya telah dituangkan dalam program Dinas Sosial dengan menetapkan besaran anggarannya, sehingga pelaksanaan Diklat ini bisa dilaksanakan dan tepat Sasarannya.

Tujuan dari pemberian Diklat kepada Kelompok KUBE adalah untuk memberikan peningkatan keahlian dan kemampuan anggota KUBE baik secara manajemen maupun keterampilannya. Dengan adanya Diklat ini diharapkan kelompok KUBE bisa memanfaatkan bantuan-bantuan dana yang dikucurkan dari Dinas Sosial dengan sebaik-baiknya, sehingga peningkatan perekonomian anggota KUBE bisa lebih baik dari sebelumnya. Sementara dengan keahlian dan kemampuan yang ada kelompok KUBE juga bisa menstransfer ilmunya kepada masyarakat lain yang berada di sekitarnya.

Tabel V.2 Jumlah KUBE di Kecamatan Kuantan Tengah Memperoleh Diklat Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah KUBE	Desa/Kelurahan
2017	1 (10 Kepala Keluarga)	1 Kelurahan
2018	2 (20 Kepala Keluarga)	1 Desa 1 Kelurahan
2019	0 (Tidak Ada)	

Sumber: Pengolahan Data Lapangan, 2020.

Dengan demikian, pemerintah Diklat kepada Kelompok KUBE telah dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian masing-masing anggota kelompok KUBE, sehingga dengan adanya keahlian dan kemampuan ini kelompok KUBE bisa memberikan hasil yang baik bagi perkembangan kelompok KUBE itu sendiri yang tentunya bermuara pada peningkatan perekonomian keluarga.

Setelah melakukan pendataan dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada kelompok KUBE, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial kemudian memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha dari masing-masing kelompok KUBE yang sudah terdata dan mendapatkan diklat tersebut. Di mana bantuan diberikan kepada kelompok KUBE berupa bantuan modal atau dana bagi perkembangan usaha kelompok KUBE.

Pemberian bantuan modal atau dana ini berupa bantuan yang tidak mengikat bagi kelompok KUBE, sehingga dengan dana ini kelompok KUBE bisa memanfaatkannya sedemikian rupa untuk meningkatkan usaha dari kelompok KUBE. Di mana dengan bantuan modal ini kelompok KUBE bisa meningkatkan

dan mengembangkan usaha yang telah dijalannya dengan lebih baik lagi dalam upaya meningkatkan perekonomian masing-masing anggota kelompok KUBE.

KUBE dibentuk tahun 2009 sampai saat ini dengan daya yang dikucurkan untuk masing-masing KUBE sebesar Rp. 16.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,- sesuai dengan jenis usaha dan jumlah anggota kelompok. Kucuran dana untuk masing-masing KUBE berbeda-beda sesuai dengan kategori dan kriteria dari KUBE yang dijalani masyarakat miskin.

Tabel V.3 Jumlah Dana Bantuan KUBE di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah KUBE	Desa/Kelurahan
2017	2 KUBE	Rp. 36.000.000,-
2018	4 KUBE	Rp. 80.000.000,-
2019	1 KUBE	Rp. 18.000.000,-

Sumber: Pengolahan Data Lapangan, 2020.

Beragamnya besaran bantuan modal yang diberikan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial kepada masing-masing kelompok KUBE tentunya didasari dari jenis usaha dan juga jumlah anggota kelompok yang tergabung di dalam KUBE. Di mana dengan adanya perbedaan besaran dana yang diterima kelompok KUBE ini bisa memicu perkembangan usaha KUBE agar dengan dananya yang ada bisa lebih maju lagi usahanya dan perkembangan usahanya lebih baik dari sebelumnya serta yang paling penting meningkatkannya perekonomian keluarga.

KUBE tepat sasaran untuk membantu perekonomian para anggota, karena apabila dana bantuan yang mereka terima mampu mereka kelola dan mereka kembangkan dengan baik dalam usaha yang dijalannya dengan mengedepankan kebersamaan untuk kesejahteraan bersama seperti seperti membuat uang kas, uang



simpan pinjam sehingga dana yang mereka terima tersebut meskipun sudah lama tetapi masih ada hingga saat ini. Namun apabila dana bantuan yang diberikan tidak terkelola dengan baik, maka dapat dipastikan kelompok KUBE hanya tinggal sebuah nama dan jenis usaha tanpa mendapatkan hasil bagi kemaslahatan masing-masing anggota kelompoknya.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi telah memberikan bantuan berupa modal atau dana kepada kelompok KUBE yang telah terdata, kemudian diseleksi untuk mendapatkan bantuan pendidikan dan pelatihan, dan setelah selesai menerima diklat maka masing-masing kelompok diberikan bantuan modal dengan besaran dana yang berbeda sesuai dengan jenis usaha dan jumlah anggota pada kelompok KUBE.

### **3. Bimbingan**

Bimbingan adalah memberikan bantuan kepada kelompok KUBE untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola potensi yang ada dan pengetahuan yang dimilikinya. Dampak kebijakan bimbingan ini adalah akibat-akibat positif yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Wawancara dengan Bapak Drs. Napisman, M.Si selaku Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai program KUBE ini :

*“Telah ada bimbingan yang diberikan pemerintah secara langsung kepada anggota kelompok KUBE yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Beragam jenis bimbingan yang diberikan mulai dari bimbingan dalam mendirikan kelompok, menjalankan kelompok, dan jenis bimbingan lainnya”* (Wawancara tanggal 20 Maret 2020)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa program KUBE di Kabupaten Kuantan Singingi ini dimulai dari adanya kegiatan bimbingan yang dilakukan para pegawai dilapangan kepada masyarakat miskin dengan cara pemberian sosialisasi kepada masyarakat mengenai programnya, cara pembentukannya, dan pemanfaatannya. Setelah dilakukan penyuluhan, masyarakat dianjurkan untuk membentuk kelompok KUBE sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nia Kunita, S.Sos. M.Si selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, diperoleh informasi bahwa:

*“Memberikan beragam jenis bimbingan kepada para anggota kelompok KUBE dalam skala perkelompok maupun dalam pertemuan-pertemuan yang dibuat pemerintah maupun dari persatuan kelompok tersebut. Bimbingan yang paling dominan diberikan adalah dengan menjaga eksistensi atau keberadaan kelompok dan tetap konsisten menjalankan kegiatan KUBE.”*(Wawancara tanggal 21 Maret 2020)

Tanggapan di atas memberikan pernyataan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Sosial telah melaksanakan sosiaslisasi, menyampaikan prosedur pembentukan KUBE, dan tentunya mengajak masyarakat untuk berkelompok membentuk KUBE sesuai dengan kemampuan dan keahlian serta potensi yang dimilikinya. Setelah penyuluhan dilakukan diharapkan masyarakat miskin membentuk kelompok KUBE sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang bisa dilakukan, agar kedepannya kelompok KUBE bisa tumbuh dan berkembang dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan perekonomian para anggotanya.

Begitu juga dengan hasil wawancara bersama Bapak Suherman selaku Pendamping Kecamatan, diperoleh informasi bahwa:

*“Bimbingan pada kelompok KUBE senantiasa diberikan sesuai dengan arahan yang diberikan atasan maupun atas permintaan dari persatuan kelompok KUBE.”*(Wawancara tanggal 25 Maret 2020)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan telah dilaksanakan penyuluhan yang dilakukan pemerintah mengenai KUBE ini awalnya dijalankan dari sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian mengajak masyarakat untuk membentuk kelompok dan mengenali potensinya.

Wawancara dengan salah seorang ketua Kelompok KUBE di Kuantan Tengah diperoleh informasi bahwa:

*“Telah ada bimbingan yang diberikan pemerintah beberapa waktu yang lalu. Sampai saat ini penyuluhan tersebut telah memberi kesan kepada kami sehingga terbentuknya kelompok KUBE yang saat ini sedang dijalani.”*(Wawancara tanggal 21 Maret 2020)

Tujuan dari didirikannya kelompok KUBE adalah meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi dan terjalinnya hubungan kerja sama yang erat antar masyarakat dalam satu wilayah. Di mana dengan adanya kelompok KUBE yang berusaha secara bersama-sama dengan modal patungan dan modal bantuan dari pemerintah tentunya mengharapkan memperoleh hasil dari usaha yang dijalannya dalam bentuk uang, sehingga dengan adanya peningkatan perkembangan usaha akan memberikan dampak bagi penghasilan dari masing-masing anggota kelompok berupa hasil dari keuntungan usaha.

Anggota KUBE secara berkelompok menjalankan usaha yang dirintis dan diinisiasi bersama. Di mana semua jenis usaha dijalani bersama dengan modal yang diperoleh dari bantuan pemerintah daerah yakni Dinas Sosial sebesar Rp. 16.000.000,-sampai dengan Rp.20.000.000,- dan dari hasil usaha yang diperoleh masing-masing KUBE memiliki kesepakatan yang berbeda. Ada KUBE yang

membagikan hasil usaha/keuntungan usaha secara merata, dan ada KUBE yang menyisihkan keuntungan usaha untuk menambah modal, serta ada juga terdapat beberapa KUBE yang tidak berhasil sama sekali. Dengan demikian jelaslah bahwa KUBE yang dijalani masyarakat ada yang berhasil menambah penghasilan bagi keluarganya dan ada juga KUBE yang tidak berhasil disebabkan oleh berbagai faktornya.

Berdasarkan fakta di Kecamatan Kuantan Tengah terdapat beberapa KUBE memang mampu memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga berkisar Rp. 700.000 – Rp.1.500.000 per bulan, sehingga program KUBE ini cukup baik untuk memberikan sumbangan dalam mengurangi angka kemiskinan dan memberikan tambahan perekonomian pada anggota kelompoknya. Namun ada juga beberapa KUBE yang tidak menghasilkan pendapatan bagi anggota kelompoknya karena tidak usaha yang dijalani tidak dikelola dengan baik.

KUBE meningkatkan kesejahteraan anggota karena program bantuan KUBE yang telah pemerintah laksanakan sasarannya adalah masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin untuk membentuk usaha ekonomi produktif sesuai dengan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh anggotanya, dengan harapan usaha yang dikelola mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keseharian para anggota, dan dari pendapatan yang anggota terima dapat anggota manfaatkan dengan baik untuk kepentingan keluarganya. Adapun untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, masing-masing kelompok KUBE bisa saja melakukan kegiatan lainnya untuk anggotanya agar keuntungan yang diperoleh bisa terkumpul, seperti mengadakan arisan, mengadakan uang kas,



mengadakan uang iuran sehingga dengan kegiatan tersebut dapat anggota memanfaatkan dari anggota untuk anggota, di sisi lain para anggota bisa saling menjalin silaturahmi, bertukar pikiran dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dari beberapa upaya atau langkah yang dilihat maka dapat diketahui bahwa tahapan pelaksanaan kegiatan KUBE di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dirumuskan sebagaimana tertuang di dalam tabel di bawah ini:

Tabel V.4 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan KUBE

No.	Tahapan	Pelaksanaan Kegiatan
1	Tahap Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Observasi</li> <li>2. Pemetaan sosial</li> <li>3. Pemetaan Kebutuhan</li> <li>4. Registrasi sasaran</li> <li>5. Motivasi dan bimbingan.</li> <li>6. Pembentukan KUBE (Penentuan jenis Usaha, pengelolaan, pengguliran).</li> <li>7. Penyuluhan</li> <li>8. Evaluasi persiapan (pendekatan calon anggota KUBE, Kesepakatan IKS dan proses pengguliran).</li> </ol>
2	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan dengan kriteria.</li> <li>2. Pembentukan Kelompok</li> <li>3. Penentuan jenis usaha</li> <li>4. Pelatihan sesuai dengan jenis usaha</li> </ol>
3	Bimbingan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring,</li> <li>2. Evaluasi</li> </ol>
4	Kemitraan Usaha	Memperkenalkan kinerja KUBE
5	Pengendalian	Penilaian pelaksanaan program

Hasil dari kegiatan KUBE yang telah dilaksanakan diharapkan anggota KUBE tidak tergantung oleh dana bantuan pemerintah, meskipun dana bantuan tidak mereka dapatkan lagi usaha yang mereka jalankan tetap berjalan dengan

menghandalkan uang simpan pinjam para anggota sebagai perputaran modal di antara anggota kelompok.

Program KUBE di Kabupaten Kuantan Singingi ini dimulai dari adanya kegiatan bimbingan yang dilakukan para pegawai dilapangan kepada masyarakat miskin dengan cara pemberian sosialisasi kepada masyarakat mengenai programnya, cara pembentukannya, dan pemanfaatannya. Setelah dilakukan penyuluhan, masyarakat dianjurkan untuk membentuk kelompok KUBE sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Dinas Sosial telah melaksanakan sosialisasi, menyampaikan prosedur pembentukan KUBE, dan tentunya mengajak masyarakat untuk berkelompok membentuk KUBE sesuai dengan kemampuan dan keahlian serta potensi yang dimilikinya. Setelah penyuluhan dilakukan diharapkan masyarakat miskin membentuk kelompok KUBE sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang bisa dilakukan, agar kedepannya kelompok KUBE bisa tumbuh dan berkembang dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan perekonomian para anggotanya.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dari program kerja yang telah dilaksanakan pada pembentukan KUBE dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dinas Sosial yang merupakan instansi yang paling dekat dengan masalah kemiskinan sangat berperan pengentasan kemiskinan masyarakat. Program KUBE merupakan program yang sasarannya adalah keluarga fakir miskin atau kurang mampu. Tujuan program tersebut adalah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

sosial keluarga miskin dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi.

### **B. Hambatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Membina Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Kecamatan Kuantan Tengah**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ditemukan beberapa hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan peran untuk membina masyarakat yang tergabung pada KUBE. Adapun hambatan tersebut yakni:

#### 1. Penyuluhan

Dalam melakukan penyuluhan kendala yang paling besar dihadapi yakni masyarakat hanya bersikap pasif atau mendengar saja pada saat penyuluhan, sehingga banyak dari masyarakat yang kurang paham tujuan dan manfaat dari terbentuknya KUBE. Di mana terdapat setelah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat di desa-desa ada masyarakat yang belum mengerti baik dari segi kriteria kelompok, persyaratan, maupun jenis kegiatan yang akan dijalani dalam kelompok yang akan didirikan.

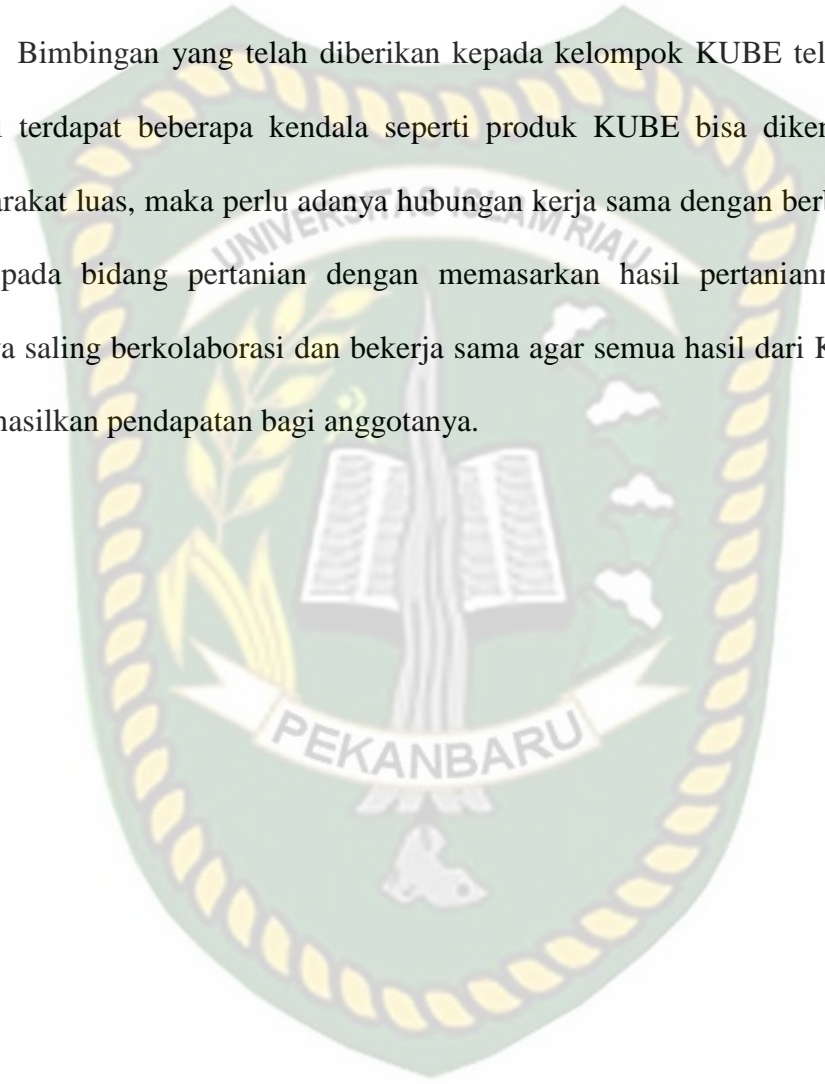
#### 2. Pengarahan

Telah ada pengarahan yang diberikan kepada kelompok KUBE, tetapi tidak seluruh anggota kelompok bisa hadir pada saat memberikan pengarahan seperti pengarahan yang dilakukan di balai desa dan sebagainya. Begitu juga pada saat pengarahan yang dilakukan secara langsung kepada masing-masing kelompok KUBE terdapat kebanyakan anggota kelompok yang tidak bisa hadir

secara keseluruhan, sehingga pengarahan yang paling besar didengar oleh beberapa anggota saja.

### 3. Bimbingan

Bimbingan yang telah diberikan kepada kelompok KUBE telah berjalan. Tetapi terdapat beberapa kendala seperti produk KUBE bisa dikenalkan pada masyarakat luas, maka perlu adanya hubungan kerja sama dengan berbagai pihak. Baik pada bidang pertanian dengan memasarkan hasil pertaniannya, bidang lainnya saling berkolaborasi dan bekerja sama agar semua hasil dari KUBE dapat menghasilkan pendapatan bagi anggotanya.





## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka didapatkan kesimpulan bahwa pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dari program kerja yang telah dilaksanakan pada pembentukan KUBE dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dinas Sosial yang merupakan instansi yang paling dekat dengan masalah kemiskinan sangat berperan pengentasan kemiskinan masyarakat. Program KUBE merupakan program yang sasarannya adalah keluarga fakir miskin atau kurang mampu. Tujuan program tersebut adalah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial keluarga miskin dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Program bantuan KUBE adalah bantuan usaha untuk keluarga fakir miskin yang telah membentuk suatu kelompok dengan komposisi 5-10 orang tiap kelompoknya dan total bantuannya bernilai 22 juta per kelompok usaha bersama (KUBE). Adapun efektif tidaknya pelaksanaan program-program ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, didapatkan hasil bahwa dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang dilakukan kurang maksimal, hal tersebut dikarenakan karena beberapa faktor. Namun secara keseluruhan pelaksanaan KUBE ini sudah cukup efektif dilihat dari terlaksananya program-program tersebut dilihat dari tersalurkannya bantuan sesuai rencana dan ketepatan sasaran serta anggaran untuk pelaksanaan program-program tersebut.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam menjalankan peran untuk membina masyarakat yang tergabung pada KUBE yakni terdapat masyarakat hanya bersikap pasif atau mendengar saja pada saat penyuluhan, sehingga banyak dari masyarakat yang kurang paham tujuan dan manfaat dari terbentuknya KUBE. Di mana terdapat setelah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat di desa-desa ada masyarakat yang belum mengerti baik dari segi kriteria kelompok, persyaratan, maupun jenis kegiatan yang akan dijalani dalam kelompok yang akan didirikan. Tidak seluruh anggota kelompok bisa hadir pada saat memberikan pengarahan seperti pengarahan yang dilakukan di balai desa dan sebagainya. Begitu juga pada saat pengarahan yang dilakukan secara langsung kepada masing-masing kelompok KUBE terdapat kebanyakan anggota kelompok yang tidak bisa hadir secara keseluruhan, sehingga pengarahan yang paling besar didengar oleh beberapa anggota saja. Kurangnya berkolaborasi dan bekerja sama agar semua hasil dari KUBE dapat menghasilkan pendapatan bagi anggotanya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pembinaan KUBE sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah daerah memberikan pembinaan kepada masyarakat miskin dengan sebelumnya berkoordinasi dengan pemerintah desa, sehingga diketahui dengan jelas sasaran dari pembinaan untuk membentuk kelompok KUBE. Kemudian dalam memberikan pengarahan harus diundang seluruh

anggota KUBE agar semua bisa mendapatkan pencerahan dan pengetahuan mengenai program KUBE yang sedang dijalani. Bimbingan yang diberikan hendaknya dilakukan secara kontinu dan terus menerus, sehingga kelompok KUBE bisa terus tumbuh dan berkembang dalam upaya peningkatan perekonomian di masyarakat.

2. Hendaknya pemerintah daerah melalui Dinas Sosial membuat terobosan baru dengan dalam menjalankan program KUBE, agar ketertarikan masyarakat semakin besar untuk membentuk KUBE dalam usaha mengentaskan angka kemiskinan.
3. Hendaknya tenaga penyuluh lapangan atau PSM yang ada di masing-masing kecamatan berperan secara aktif dengan mendatangi dan mendata kelompok KUBE dalam berbagai hal agar tergambar dengan jelas tingkat keberhasilan dari program KUBE yang dijalani pemerintah.
4. Hendaknya masyarakat proaktif dalam menyambut dan menjalankan program KUBE, sehingga program KUBE yang dilaksanakan pemerintah berhasil menciptakan perekonomian baru bagi masyarakat miskin.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-buku:

- Abdullah, Rozali. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta
- BPS. 2017. Provinsi Riau Dalam Angka Tahun 2017
- Eddyono, Luthfi Widagdo. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Insignia Strat.
- Efendi, Mahrizal, 2003. *Pembinaan Ekonomi dan budaya Indonesia*, Jakarta: Penerbit PN Balai Pustaka.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2002. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusnadi. 2005. *Pengantar Manajemen*. Malang: Unibraw Press.
- Kountur, Ronny. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Teruna Grafica.
- Mangunhardjana, 2004. *Pembinaan arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mathis, Robert L dan John H. Jakson. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology Jilid 1 dan 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Pamudji. 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, Ryaas, 1997. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone,
- Riduwan. 2013. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.



- Salam, Dharma Setyawan. 2007. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan Nilai dan Sumber Daya Alam. Jakarta: Djambatan.*
- Santoso, Harianto. 2005. Disini Matahariku Terbit. Jakarta: Gramedia.*
- Sarundajang, S.H. 2002. Birokrasi Dalam Otonomi Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.*
- Sedarmayanti. 2004. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Mandar Maju.*
- Situmorang. 1994. Reformasi Pelayanan Publik. Teori Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.*
- Soekanto, Soerjono. 2004. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.*
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.*
- Sunarno, Siswanto, 2005. Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.*
- Supriyatno, Budi. 2009. Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis). Tangerang: Media Berlian.*
- Suryaningrat, Bayu. 2002. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Jakarta : Aksara Baru*
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.*
- Syafiie, Inu Kencana. 2005, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Refika Cipta.*
- Thoha, Miftah. 2011. Pembinaan Organisasi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.*
- Thoha, Miftah. 2008. Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.*
- Tutik, Titik Triwulan. 2005. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisier.*
- Wasistiono, Sadu. 2008. Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung: Alqa Print.*

Wasistiono, Sadu. 2005. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung. Fokus Media.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah dari Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya: Insan Cendekia.

Widjaja, HAW. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widjaja, HAW. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winkel, 2002. *Dampak Pembangunan Dan pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Daerah*, Yogyakarta: Depdikbud.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1981.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi

#### **Jurnal/Skripsi/Tesis**

Ace Lingga Jati. 2013. Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Lingga (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Lingga). Jurnal Program Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

- Andi Fitrah P. Putra. 2014. Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Pengentasan Kemiskinan pada program UEP dan KUBE. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7, Nomor 2, Juli 2014 (127-136) ISSN 1979-5645*
- Ahmad Imaduddin. 2016. Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin Binaan Dinas Sosial Wialayah Kecamatan Samarinda Utara Di Kota Samarinda. *eJournal Administrative Reform, Volume 4, Nomor 3, 2016: 351-362.*
- Chandra Rizal. 2015. Peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar Tahun 2013. *Jom FISIP Volume. 2 No. 2 Oktober 2015.*
- Evi Fitriani. 2015. Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan KUBE Cahaya Baru (Ternak Sapi) Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah. *Jurnal Program Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji.*
- Lidia Nugrahaningsih Ayal. 2015. Peran Pendamping Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin: Studi pada Pendamping Kube FM di Kota Banjarmasin. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 39, No. 1, Maret 2015, 43-53.*
- Marlina Damuhu. 2018. Peran Pemerintah Kota Manado Dalam Mengatasi Masalah Sosial Terhadap Pengemis (Studi di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan EKSEKUTIF Volume 1 No. 1 Tahun 2018 ISSN : 2337 – 5736.*
- Morangki, Albert. 2012. *Tinjauan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Di Bidang Pertanahan, Vol.XX/No.3/April-Juni/2012*
- Muslim Sabarisman. 2015. Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Sukabumi (*SOSIO KONSEPSIA Vol. 4, No. 03, Mei - Agustus, Tahun 2015*)
- Purnama Sari. 2017. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 2 (2017).*
- Suhardi, 2013. Peran Dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Perlindungan Dan Pembinaan Anak Jalanan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik JISIP:Vol. 2, No. 1 (2013) ISSN. 2088-7469*